

LAKSANAKAN KONSEKWEN

IR. SAKIRMAN

SIP no. 440/JA/64
Persamaan 68 63 10.00 ex
387/154/T/63

Ir. Sakirman



Kembali ke Dekon, Laksanakan Konsekwen Patriotisme Ekonomi

*(Laporan Tambahan tentang soal¹ ekonomi kepada
Sidang Pleno ke-II CCPKI yang diperluas dengan
Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central, di
Djakarta tanggal 23-26 Desember 1963).*



Jajasan „Pembaruan”
Djakarta 1964



rentjana kulit: Yap.

Joi

I Situasi ekonomi yang parah akibat penjelewengan Peraturan ² Ekonomi 26 Mei	7
II Memenangkan konfrontasi ekonomi terhadap „Malaysia”	12
III Laksanakan garis Manipol di bidang perdagangan luar dan dalam negeri	18
IV Atasi krisis beras	24
V Atasi kemacetan produksi dan komunikasi	33
VI Tolak „Bantuan” dari manapun yang merugikan Indonesia	39
VII Teruskan pembangunan berentjana yang demokratis dan patriotik	44

Kawan Ketua,
Kawan Pimpinan, dan
Kawan lainnja jang tertjinta,

Saja per-tama² menjatakan persetudjuan saja atas seluruh isi Laporan Politik Kawan Ketua jang telah disampaikan kepada Sidang Pleno ke-II CC ini. Saja djuga dapat menerima dan menjetudjui sepenuhnya kebidjaksanaan jang telah dilakukan oleh Pimpinan Partai selama periode antara Sidang Pleno ke-I dan Sidang Pleno ke-II.

Saja akan memberikan Laporan Tambahan jang berisi pada pokoknja perintjian lebih landjut mengenai soal² ekonomi, dengan memberikan perhatian khusus kepada beberapa segi perkembangan ekonomi nasional kita pada waktu² belakangan ini.

I

SITUASI EKONOMI JANG PARAH AKIBAT² PENJELEWENGAN PERATURAN² EKONOMI 26 MEI

Waktu 7 bulan adalah sangat pendek dalam sedjarah, dan lebih pendek lagi bagi konseptor² Peraturan² Ekonomi 26 Mei. Para konseptor dan arsitek, begitu djuga para pembela jang setia dari-pada Peraturan² Ekonomi 26 Mei tidak pernah memimpikan bahwa Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang mereka gambar-gemborkan sebagai „peraturan² untuk melaksanakan DEKON“, hanja berumur 7 bulan, tidak lebih dan tidak kurang. Dan inipun djika kita pakai ukuran² formil juridis berdasarkan keterangan Pemerintah didepan Sidang Pleno DPR-GR tanggal 12 Desember 1963 jang baru lalu. Presiden Sukarno sendiri telah lebih dulu, jaitu dalam sidang PB FN pada tanggal 5-6 September 1963 jang lalu menjatakan pendapatnja dapat menjetudjui keputusan Sidang Pleno PB FN itu untuk mengubah Peraturan² Ekonomi 26 Mei.

Belum pernah terdjadi dalam sedjarah perkembangan ekonomi Indonesia, bahwa dalam waktu 7 bulan situasi ekonomi kita telah mengalami kekatjauan² dan kerusakan² jang begitu hebatnja. dengan akibat²nja jang sangat luas dan mendalam. Hal ini disebabkan, karena berbeda dengan banjak peraturan² jang telah dia-

dakan selama beberapa tahun terakhir ini, seperti peraturan SIVA, peraturan Oktober 1962 dan lain-lain, Peraturan 26 Mei bukanlah suatu tindakan moneter konvensional se-mata-mata, akan tetapi sudah jauh melampaui batas "wewenang" konsepsi konvensional yang klasik, disebabkan karena peraturan itu: Pertama: Memberikan dasar yang legal sekaligus kepada tindakan devaluasi resmi dan devaluasi de facto, sehingga nilai tukar rupiah kita menjadi sangat merosot dan akan terus merosot dalam ukuran yang tidak ada tarajanya dalam sedjarah. Devaluasi resmi ini dilakukan lewat apa yang dinamakan "perangsang" rupiah bagi kaum exportir dan pungutan HPN (Hasil Perdagangan Negara) atas barang import sebanjak Rp. 270,— untuk setiap AS \$, sehingga kurs resmi dan legal rupiah kita terhadap AS \$ menjadi sama dengan Rp. 270,— + Rp. 45,— = Rp. 315,—. Devaluasi de facto dilakukan lewat HPN tambahan sebanjak Rp. 225,— untuk barang golongan II dan Rp. 495,— untuk barang golongan III, dan lewat bea masuk sebanjak 50% dan 100% bagi masing-masing golongan itu. Dengan begitu, maka harga import barang golongan I sekalipun tidak dikenakan HPN tambahan dan bea masuk, barang golongan I seperti beras, harganya menjadi 7 kali lipat dibandingkan dengan harga sebelum berlakunya Peraturan Ekonomi 26 Mei. Sedangkan, dengan pengetahuan sederhana dapat dibuat perhitungan, bahwa harga import (landed cost) barang golongan II, misalnya sebuah motor disel dengan kekuatan 40 tk., jika diimport dengan devisa retensi dari exportir, bisa mentjapai se-kurang-kurangnya Rp. 2.000,— untuk setiap dolar, sehingga kurs efektif untuk setiap dolar meningkat menjadi 45 kali lipat dibanding kurs resmi sebelum berlakunya Peraturan 26 Mei itu.

Kedua: Membukakan pintu yang se-lebar-lebar bagi PDN untuk menjalankan politik liberalisasi harga sehingga praktis kedudukan PDN merosot menjadi sama dengan perusahaan dagang "swasta" yang spekulatif, dan langsung menjerang prinsip ekonomi ter-pimpin sebagaimana telah dirumuskan dalam Manipol dan Dekon. PDN bukan saja diperbolehkan, malahan diharuskan mengedjar harga pasaran bebas yang spekulatif sampai kepada tingkat se-kurang-kurangnya 70% dari harga pasaran bebas itu. Dalam prakteknya ini berarti bahwa kaum kapitalis birokrat dalam PDN diberi kebebasan main kongkalikong dengan tukang "tjatut" untuk mendorong harga barang golongan II dan golongan III sampai setinggi langit dengan akibat sangat merugikan Rakyat banyak, terutama kaum konsumen miskin dan hanya menguntungkan kaum kapitalis monopoli asing, kaum komprador, kaum kapitalis birokrat dan kaum spekulasi.

Ketiga: Menetapkan politik tarif yang kedjam dengan menaikkan setjara resmi tarif listrik, angkutan dilaut, darat dan udara dengan 300-400% sehingga sangat mendorong lebih pesat lagi mem-bubungnja harga dan memperhebat inflasi terbuka.

Inilah isi dan jiwa yang sesungguhnya daripada teror Peraturan Ekonomi 26 Mei yang dengan tepat sekali telah disimpulkan oleh Politbiro CC Partai dalam pernyataannya pada tanggal 3 Djuni 1963 yang lalu: devaluasi, liberalisasi dan kenaikan harga.

Berdasarkan pengalaman Rakjat sendiri di-waktu yang lampau yang sangat pahit mengenai tindakan moneter Pemerintah dan berdasarkan analisa yang ilmiah mengenai arah perkembangan moneter yang pasti akan timbul setelah berlakunya Peraturan 26 Mei itu, maka Partai telah mengambil sikap yang tepat pula untuk menolak penjelewengan Peraturan 26 Mei itu. Tindakan moneter konvensional yang se-mata-mata dimaksudkan untuk melegalisasi devaluasi, liberalisasi dan kenaikan harga dengan lontjatan yang tinggi itu adalah suatu perbuatan teror dibidang ekonomi dan keuangan, yang memang dikehendaki oleh kaum imperialis Amerika Serikat sesuai dengan apa yang dinamakan "program stabilisasi ekonomi", suatu tindakan yang akan meratakan djalan untuk mendjamin lebih tergantungnja lagi ekonomi Indonesia kepada kaum imperialis Amerika Serikat.

Kebenaran sikap Partai kita untuk menolak mentah Peraturan Ekonomi 26 Mei dan bukti kegagalan total daripada "program stabilisasi ekonomi" kaum imperialis itu telah lebih diperkuat lagi oleh fakta dan kenyataan daripada praktek peraturan itu selama 7 bulan belakangan ini.

Uang yang beredar yang menurut taksiran pada akhir tahun 1961 berjumlah lebih kurang Rp. 67 milyar, telah meningkat pada akhir tahun 1962 menjadi tidak kurang dari Rp. 130 milyar dan sekarang pada akhir tahun 1963 menurut perkiraan tidak berkurang malahan sebaliknya bertambah menjadi lebih dari Rp. 200 milyar, sedangkan defisit Anggaran Pembeayaan Negara yang direntjanakan sebanjak Rp. 33,4 milyar menurut perkiraan telah meningkat sampai 4 kali lipat.

Dibidang harga barang kebutuhan pokok misalnya index harga beras 2.607 pada bulan Djanuari, telah menjadi 7.564 dalam bulan Desember tahun 1963 ini, berdasarkan index 1955 = 100. Djadi dalam tempo satu tahun harga beras telah meningkat menjadi 3 kali lipat. Ini semua adalah angka resmi yang sudah tentu berbeda daripada kenyataan yang sesungguhnya berlaku dalam praktek. Menurut kenyataannya, harga beras di Djawa Tengah dan Djawa Timur telah mentjapai tingkat ke-gila-gilaan yang belum pernah

kita alami dalam zaman kemerdekaan ini, termasuk zaman Revolusi 1945-1948 yang keadaannya sebetulnya jauh lebih sulit daripada keadaan sekarang ini.

Menurut laporan² dari daerah², maka harga beras di beberapa tempat, misalnya Malang, Surabaya, Semarang, Magelang, Djokjakarta, dan lain² sudah bergerak antara Rp. 175,— sampai Rp. 200,— setiap kilogram, dan disamping itu beberapa daerah pedesaan yang biasanya terkenal sebagai daerah „surplus” tidak luput pula dari bahaya penjakit busunglapar atau bahaya kekurangan makan, sehingga Komando Aksi Anti-lapar Djateng telah terpaksa mengerjakan usaha² praktis guna membantu meringankan penderitaan Rakyat di beberapa tempat.

Sementara itu di beberapa daerah, telah diusahakan juga untuk menjual gaplek dengan harga yang lebih rendah daripada harga umum sebanyak beberapa puluh ton dari Wonogiri dan Bojolali, sedangkan Pemerintah Pusat telah menjatakan kesanggupannya untuk mengirim 40.000 ton beras.

Dalam hal „perlombaan” menderita kekurangan bahan² makanan khususnya beras rupanja Djawa Barat juga tidak mau „ketinggalan”, dan terutama daerah Kuningan dan Indramayu dimana penduduk dari banyak desa sudah menunjukkan gejala² penjakit „hongerodeem”.

Kaum tani, terutama buruhtani dan tanimiskin, sangat menderita akibat penjelewan Peraturan² 26 Mei. Disatu pihak saja beli mereka telah sangat merosot, akibat kenaikan harga barang² kebutuhan mereka, dipihak lain harga hasil² pertanian dan ternak merosot karena kesulitan² pengangkutan dan ongkos² pengangkutan yang naik setjara gila. Barang² kebutuhan kaum tani yang sangat naik harganya, bukan saja tekstil, gula pasir, minyak tanah, minyak kelapa, sabun, akan tetapi juga alat² pertanian dan pupuk. Pupuk ZA misalnya yang harga resminya Rp. 3,75 naik menjadi Rp. 20,10 dan pupuk urea dari Rp. 7,50 naik menjadi Rp. 25,— setiap kilogramnya.

Betapa merosotnya daya-beli Rakyat pekerdja, karena sangat naiknya ongkos-hidup, dapat antara lain dibuktikan bahwa masih banyak upah daripada pekerdja harian Pemerintah pada umumnya sekarang berdjumlah hanya Rp. 25,— sehari, sedangkan dibanyak tempat mereka belum juga mendapat pembagian beras setjara teratur dan kontinu.

Telah kita ketahui semua, bahwa dengan Rp. 25,— itu hanya cukup untuk membeli 1 gelas strup es.

Nasib kaum intelektual pekerdja juga tidak luput dari serangan² teror Peraturan² 26 Mei. Hampir semua golongan inteligensia

pekerdja sudah tidak sanggup lagi hidup se-mata² dari gadjinja yang diterima dari satu sumber saja.

Untuk menutup kekurangan anggaran beaja rumah tangganya, mereka pada umumnya berusaha mendapatkan sumber² penghasilan lain, dan ini sudah tentu sangat mengurangi prestasi mereka di-tempat² pekerdjaan mereka yang pokok.

Bukan saja Rakyat pekerdja kaum buruh, tani, nelayan, pekerdja² kerajinan tangan dan kaum inteligensia yang mengalami penderitaan hebat akan tetapi juga kaum pengusaha industri sedang dan kecil, terutama pengusaha² industri khususnya industri tenun. Dalam banyak surat kabar² belum lama berselang tersiar kabar, bahwa kaum pengusaha tenun di-daerah² Klaten misalnya, menderita², karena Peraturan² 26 Mei telah „memotong” modal kerdja mereka dengan tidak kurang dari 80-85%, sehingga likwiditet mereka tinggal tidak lebih dari 15%. Ini adalah pengusaha² yang tergabung dalam „koperasi” yang biasanya mendapat pembagian bahan² baku dan benang-tenun dari Pemerintah, sedangkan pengusaha² tenun sedang dan kecil yang biasanya terpaksa berusaha sendiri untuk mendapatkan bahan² baku dan benang-tenun dari pasaran bebas pada umumnya telah gulung tikar atau menghadapi kebangkrutan.

Dan menurut perkembangan yang terakhir, maka 75% dari industri kecil dewasa ini sudah tidak bekerja lagi, karena menderita kesulitan² mendapatkan bahan² baku, dan apabila bahan² baku ini ada, maka tidak terbeli lagi. Ini adalah akibat Peraturan² 26 Mei yang memberikan kesempatan se-bebas²nya kepada tukang² tjatut besar, untuk memborong bahan² itu dengan tujuan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi.

Koperasi² konsumsi baik koperasi pegawai negeri maupun koperasi² rukun kampung atau koperasi desa sebagian besar terpaksa gulung tikar karena tidak dapat menebus barang²nya dari PDN² dan karena kesulitan² pengangkutan.

Angka² lengkap tentang produksi perkebunan selama 6 bulan terakhir ini, belum tersedia untuk dibandingkan dengan angka² produksi selama pertengahan pertama tahun 1963. Akan tetapi dari fakta² yang sudah kita peroleh, mengenai akibat² Peraturan² 26 Mei dibidang perkebunan sudah dapat memberikan gambaran² jelas, bahwa Peraturan² 26 Mei sangat memerosotkan produksi perkebunan baik swasta maupun Pemerintah. Pimpinan perkebunan swasta di Djawa Barat misalnya akan terpaksa mengurangi atau menghentikan samasekali kegiatannya, karena mereka tidak sanggup lagi memberikan tjatu beras kepada 500.000 kaum buruh-

nja sebanjak tidak kurang dari 25.000 ton setiap bulan dengan harga Rp. 160,— setiap kg.

Dibidang pertambangan telah kita lihat kenyataan, bahwa ongkos produksi TABA, misalnja meningkat dari Rp. 103,5 djuta menjadi tiga kali lipat jaitu lebih kurang Rp. 310,— djuta, menurut keterangan Ketua SBTI, pada tanggal 26 Djuni 1963 di depan Sidang PB FN.

Achirnja, tidaklah perlu diterangkan lagi, bahwa pengeluaran Pemerintah Pusat maupun Daerah, dengan adanya Peraturan² 26 Mei itu, setjara umum sangat meningkat. Beberapa minggu jang lalu Pemerintah telah terpaksa mengambil keputusan untuk memberikan kredit tambahan sebanjak Rp. 9,8 miljard kepada PDN² untuk memperkuat likwiditet PDN² itu.

Demikianlah gambaran ringkas tentang praktek² daripada Peraturan² Ekonomi 26 Mei di beberapa bidang kehidupan ekonomi dengan bukti² jang hidup bahwa Peraturan² itu bukan sadja tidak berhasil mentjapai maksud jang direntjanakan, akan tetapi sebaliknya telah membikin lebih rusak dan lebih parah lagi situasi ekonomi pada umumnya dan situasi moneter khususnya, serta lebih memberatkan beban penghidupan Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani.

Pemerintah dalam keterangannya di depan Sidang Pleno DPR-GR pada tanggal 12 Desember 1963 jang lalu telah menjatakan pengakuannya dengan terus terang bahwa Peraturan² 26 Mei telah mengalami kegagalan dengan mengemukakan pula sebab² kegagalan itu jaitu karena „terlalu banjak mengharapakan bantuan beratus-ratus djuta dolar dari luarnegeri”.

Ini adalah salahsatu sebab kegagalan. Sebab² jang lain adalah karena konseptor² Peraturan² 26 Mei dengan tidak tahu malu telah melanggar dan meng-indjak² Gesuri dan Dekon, meninggalkan prinsip musjawarah dan mufakat dan tetap berpegang kepada teori² ekonomi liberal, teori ekonomi neo-kolonial jang sudah lama ditjekokkan oleh kaum imperialis kepada „ahli”² ekonomi soska dan Masjumi, teori ekonomi jang reaksioner dan bertentangan samasekali dengan Manipol dan Dekon, bertentangan sepenuhnya dengan patriotisme ekonomi.

II

MEMENANGKAN KONFRONTASI EKONOMI TERHADAP „MALAYSIA”

Projek neo-kolonial „Malaysia”, sebagai suatu manifestasi imperialisme Inggris jang mendapat sokongan penuh dari imperialisme

Amerika Serikat bertudjuan untuk mengepung dan menghantjurkan samasekali hasil² Revolusi Agustus 1945.

Dibidang ekonomi „Malaysia” akan memaksakan Indonesia supaya melepaskan politik perdagangan luarnegerinja, melepaskan pembangunan berentjana, jang dalam batas² tertentu merugikan kaum imperialis dan dengan begitu mempertahankan ketergantungan ekonomi Indonesia kepada „Malaysia”. Makaitu sikap Indonesia untuk memutuskan hubungan ekonominja dengan „Malaysia” sebagaimana jang digariskan oleh Presiden Sukarno adalah suatu sikap jang tepat dan tegas. Sikap ini sesuai dengan tuntutan Rakjat dari semua golongan dan lapisan jang berdjuaug, sesuai dengan tuntutan PKI jang telah dikemukakan oleh Kawan Njoto dalam sidang PB FN pada achir bulan September 1963 jang lalu, bahwa konfrontasi kita terhadap „Malaysia”, adalah konfrontasi total. — politik, ekonomi, militer dan kebudayaan.

Konfrontasi kita dibidang ekonomi seharusnya berkembang kearah dua djurusan :

- (a) pukulan² jang langsung kepada „Malaysia” berupa pemutusan hubungan ekonomi seperti jang telah dijalankan sekarang, dan mengambil tindakan² terhadap perusahaan² kaum imperialis Inggris dan perusahaan² kaum imperialis lainnja jang menjokong „Malaysia” terutama AS ;
- (b) bersamaan dengan itu mengambil tindakan tegas menanggulangi soal ekonomi, tindakan² jang kongkrit untuk memperbaiki penghidupan Rakjat, dan tindakan² lainnja jang dapat membangkitkan kegembiraan serta keuletan kerdja Rakjat.

Dalam pada itu, perdjuaugan mengganjang „Malaysia” dibidang ekonomi harus pula sedjauh mungkin meletakkan dasar untuk membangun ekonomi Indonesia jang tidak tergantung, ekonomi jang merdeka penuh, bebas daripada sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme seperti dinjatakan dalam Dekon. Djadi harus diberantas usaha² dari sementara golongan jang ingin menggerowoti tindakan² konfrontasi itu dengan disatu fihak bersikap pasif terhadap pemutusan hubungan ekonomi dengan „Malaysia”, dan di fihak lain berusaha memindahkan ketergantungan Indonesia dari „Malaysia” (ca Singapura, Penang dan Malaya) kepada Hongkong dan negara² imperialis lainnja, setjara langsung atau tidak langsung.

Singapura, Penang dan Malaya mempunyai peranan jang sangat penting sebagai pusat² perdagangan barang² export Indonesia. Barang² export ini, terutama karet, minjak hasil maskapai² asing, kopra, lada, timah dan minjak sawit di-reexport ke Amerika Serikat, Inggris dan negara² Eropa lainnja.

Menurut catatan² resmi, maka jumlah nilai export Indonesia ke Singapura, Penang dan Malaya dalam tahun 1961 tidak kurang dari AS \$ 215,8 juta atau Rp. 9.810,— juta dan merupakan 27,3% dari nilai seluruh export Indonesia.

Dari jumlah ini, nilai export karet ke Singapura dan Penang meliputi Rp. 3.770,— juta atau hampir 40%, timah Rp. 800,— juta atau 8,15% dan kopra Rp. 780,— juta atau hampir 8% dari seluruh nilai export Indonesia ke Singapura, Penang dan Malaya.

Seperti akan diuraikan lebih lanjut, maka perdagangan transit dengan Singapura sebagai pusatnya yang diperlengkapi dengan pelabuhan bebas dan matjam² variasinya lagi adalah identik dengan penyelundupan. Menurut angka² yang dapat dikumpulkan dan yang kebenarannya tidak perlu diragukan, maka jumlah karet yang diselundupkan ke Singapura dari tahun 1954 sampai tahun 1960 saja tidak kurang dari 1.050.000 ton atau rata² lebih kurang 150.000 ton setahun, sedangkan jumlah kopra yang diselundupkan setiap tahunnya, — buat sebagian besar ke Singapura, — lebih kurang 100.000 ton.

Sikap tegas dari Pemerintah yang telah digariskan oleh Presiden Sukarno untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan „Malaysia“, ternyata telah membawa akibat² yang sangat berat bagi „Malaysia“. Dalam tempo 3 bulan saja, menurut keterangan resmi dari apa yang menamakan diri „Menteri Perdagangan Dan Industri Singapura“ telah menderita kerugian tidak kurang dari Str. \$ 327 juta atau AS \$ 109 juta. Dan bukan saja pengusaha² besar di Singapura telah mulai me-rengke² agar konfrontasi Indonesia dibidang ekonomi dihentikan, akan tetapi „Menteri Perdagangan Dan Industri Malaysia“, Lim Swee Aun, menurut berita dalam harian „Ekonomi Nasional“ tanggal 4 November 1963 yang lalu, telah menyatakan, bahwa „Pemerintah 'Malaysia' tidak akan sampai kepada penyelesaian politiknya dengan pihak Indonesia, apabila konfrontasi ekonomi Indonesia terhadap 'Malaysia' tetap dilakukan“. Dan tidak kurang dari kepala-boneka si Tengku sendiri yang pernah mengatakan bahwa „konfrontasi Indonesia benar² akan mentjekik lehernya 'Malaysia', ketjuati katanja, apabila bangsa² 'Malaysia' dengan segala djalan berusaha untuk menarik sekutu²nja (kaum imperialis Inggris dan Amerika) kedalam satu front yang bulat menghadapi Indonesia“.

Meskipun begitu, adalah keliru sekali untuk memperketjil kekuatan musuh, lebih² djika kita ketahui bahwa yang pegang peranan pokok dibelakang pembentukan negara neo-kolonial „Malaysia“ adalah kaum imperialis Inggris yang disokong oleh kaum imperialis

Amerika Serikat dan kaum reaksioner di-negara² lain, seperti Djepang, Djerman Barat dan lain² dan kaum kontra-revolusi di Indonesia, kakitangan kaum imperialis.

Untuk mengkonsolidasi dan mengembangkan tindakan² konfrontasi ekonomi terhadap „Malaysia“ lebih lanjut, harus diambil langkah² kongkrit dan berentjana, bukan saja dibidang teknis-ekonomis akan tetapi djuga dibidang keamanan dan aparat, sebagaimana setjara pokok telah dikemukakan oleh Wakil² CC Partai didepan Sidang PB FN pada achir bulan September 1963 yang lalu. Dibidang keamanan, ketjuali harus didjamin adanya pendjagaan keras dan tegas terhadap lalulintas dilaut antara RI dengan „Malaysia“, djuga harus segera diambil tindakan untuk mensita semua modal yang sebetulnya dimiliki oleh pengusaha² Singapura, akan tetapi, yang dengan menggunakan orang² Indonesia sebagai „stromannen“ antara lain diinvestasi dibidang perusahaan remilling di Sumatra Selatan. Sebaliknya harus djuga diperiksa lebih djauh, sampai dimana kebenaran berita² bahwa banjak pemilik² perusahaan² remilling di Indonesia yang menanam modalnya di Singapura dibidang perusahaan karet yang berkwalitet tinggi. Tudjuannya adalah untuk mengolah karet Rakjat tidak di Indonesia akan tetapi di Singapura. Remilling²nja di Indonesia hanya dipakai sebagai kedok untuk membeli banjak karet Rakjat berkwalitet rendah, dan meneruskannya ke Singapura. Usaha² dari pengusaha² gadungan dibidang penyelundupan yang sangat merugikan perdjuaan konfrontasi ini, tidak boleh kita perketjil artinja.

Untuk dapat menjalankan tugas berat dibidang keamanan ini dengan se-baik²nja, maka dibutuhkan alat² negara yang berani bertindak tegas, konsekwen dan berdjawa Manipolis sedjati. Demikian djuga harus didjamin agar aparat² perekonomian dengan personalianja yang biasanja bertugas mengurus soal import-export ke Singapura, Penang dan Malaya benar² dapat menjalankan tugasnya yang sekarang, jaitu setjara konsekwen melakukan konfrontasi terhadap „Malaysia“.

Menurut berita² terachir banjak djuga hasil² yang telah tertjapai dibidang pemberantasan lalu-lintas penyelundupan. Selama lebih kurang 3 bulan, telah dapat disergap 4 kapal „Malaysia“ dan lebih kurang 50 perahu² penyelundup yang memuat ratusan ton barang² terutama barang² lux.

Dalam hubungan ini kita dapat menjambut keputusan yang baru² ini diambil oleh Gubernur Kepala Daerah Riau tentang prinsip „barter“ yang berlaku bagi perdagangan daerah Riau Daratan dengan daerah lain di Indonesia, ataupun dengan luarnegeri, dengan pengertian bahwa harus ada djaminan sepenuhnya bahwa tidak

akan dilakukan perdagangan „barter” gelap dengan luarnegeri, khususnja dengan „Malaysia”.

Djalan jang tepat untuk membebaskan Indonesia dari ketergantunganja kepada Singapura, Penang dan Malaya ialah seharusnya dengan memindahkan pasaran bahan² export kita langsung ke Indonesia, dan bukan memindahkannya ke-negeri² lain.

Akan tetapi memindahkan pasaran ke Indonesia se-kali² tidak boleh diartikan memindahkan peranan Singapura-Malaya sebagai pusat perdagangan transito ke Indonesia, misalnja dengan mentjip-takan pelabuhan bebas, free trade zones dan bonded warehouse, sebab :

- a. Barang² export jang diperdagangkan dan mendjadi problem Indonesia adalah barang² jang dikuasai oleh Indonesia. Sekalipun untuk sementara ada kesulitan dalam putusnja hubungan dengan Singapura-Malaya tetapi perspektifnja baik sekali djika tindakan² selanjutnja tepat. Bagi Singapura-Malaya merupakan satu kesulitan jang sangat lama dan berat karena mereka tidak mendapat barang² lagi dari Indonesia setjara langsung.
- b. Pelabuhan bebas dengan segala variasinja adalah pertanda daripada kelemahan ekonomi negara² jang bersangkutan jang hanya hidup dari pelayanan², jaitu melajani barang² kaum kapitalis monopoli jang menghadapi kesulitan pasar. Untuk menarik kapitalis² asing diadakan pelayanan² setjara istimewa dan menjejuluh, seperti fasilitas pelabuhan, bank services, night-clubs dan akibatnja ialah meredjalelanja penjelundupan, gangster dan banditisme, pelatjuran, mata² dan gerakan subversi asing.
- c. Karena pelabuhan bebas dengan segala variasinja itu, dalam prinsipnja adalah berdasarkan services, maka akan ada industri ringan, pengepakan (packing), pembotolan (bottling), penjisihaan (sortering) dan peningkatan mutu (up-grading) jang terutama akan dimiliki oleh kapitalis² monopoli asing. Suatu golongan pengusaha² besar Indonesia tertentu berilusi untuk memperkuat kedudukan kapitalis² nasional kita didaerah pelabuhan bebas. Tetapi tanpa mendjadi komprador atau kapitalis birokrat tidak mungkin. Perlu diketahui bahwa diantara pembela² pelabuhan bebas adalah djuga banjak elemen² kapitalis birokrat. Untuk keperluan pembangunan, pelabuhan bebas tidak dapat menjediakan barang² modal jang kita perlukan tanpa menggunakan pedagang² pelabuhan bebas, maka dengan begitu kita setjara sukarela membuang ongkos untuk biaja perantara² dipelabuhan bebas jang mestinja tidak perlu. Golongan pengusaha besar tersebut akan memasukkan sebagai bank service

utama dalam pelabuhan bebas nanti, ialah Bank Pembangunan Swasta.

- d. Singapura-Hongkong sebagai pusat perdagangan transito dan pelabuhan bebas sebenarnya mempunyai sandaran negara² jang mengkonsumsi barang² hasil industri negara² imperialis seperti Inggris, Amerika Serikat dan achir² ini barang² Djepang. Imperialis Inggris menggunakan Singapura sebagai pusat pemasaran barang²nja untuk negara² tetangganya jaitu Birma, Malaya, Indonesia, Muang Thai dan lain². Hongkong dimaksudkan sebelum berdirinja RRT untuk melajani Tiongkok, tetapi sekarang malahan sebagian, sekalipun terbatas, barang² RRT masuk kepasar Hongkong. Sehingga Hongkong sekarang lebih banjak menjandarkan diri pada Filipina dan Indonesia, sebagai negeri² konsumen.
- e. Bagi Indonesia adalah tidak logis untuk mendirikan pelabuhan bebas untuk melajani Indonesia sendiri dengan menjediakan sebagian areal pelabuhannya guna memanggil kapitalis monopoli asing mengadakan kegiatan² ekonomi dan subversi serta bermain² di-pelabuhan² Indonesia. Dan barang² jang akan diperdagangkan adalah barang² djadi jang mewah. Untuk barang² export kita adalah lebih baik mendirikan trade centres dengan menjediakan fasilitas² jang tjukup dimana pembeli² luarnegeri dapat dengan mudah berbelanja di Indonesia. Atau kita mengadakan hubungan langsung dengan negara² the new emerging forces atas dasar saling menguntungkan.
- f. Negara jang berdaulat, jang mempunyai sumber² ekonomi jang luas dan kaya raja dengan Rakjatnja 100 djuta lebih seperti Indonesia, dan jang mempunyai kemampuan jang tjukup untuk hidup dari produksinja, dari perkembangan ekonominja sendiri, tidak seharusnya mengembangkan aktivitet ekonominja dari pelayanan² kepada kaum kapitalis monopoli asing.
- g. Pelabuhan bebas dengan segala matjam variasinja adalah bertentangan dengan Haluan Negara dan pedoman² pelaksanaannya, bertentangan dengan ekonomi terpimpin menurut Manipol, Deklarasi Ekonomi dan Ketetapan² serta Resolusi² MPRS, jang menolak liberalisasi ekonomi.

III

LAKSANAKAN GARIS MANIPOL DIBIDANG PERDAGANGAN LUAR DAN DALAMNEGERI

Karena pada pokoknya ekonomi Indonesia masih mendasarkan aktivitasnya pada bidang perdagangan luarnegeri dengan menggantungkan diri pada pasaran negeri² imperialis, maka sisa² imperialisme dibidang ini mempunyai pengaruh yang langsung dan menentukan bagi perkembangan perekonomian dan keuangan kita. Hal sematjam ini bukan sadja berlaku bagi Indonesia akan tetapi pada umumnya djuga berlaku bagi semua negara² Asia-Afrika-Amerika Latin yang baru berkembang dan belum dapat membebaskan diri dari ketergantungannya kepada ekonomi imperialis.

„Negara² Barat merampok negara² Asia-Afrika”, demikianlah keterangan seorang pedjabat organisasi Asia-Afrika dalam konferensi persnya di Kairo pada tanggal 2 Desember 1963 yang lalu. „Penurunan harga export bahan² mentah ke-negara² Barat dan kenaikan harga import barang² industri dari negara² itu, telah menimbulkan kerugian amat besar bagi negara² yang sedang berkembang. Harga bahan² mentah merosot dengan 27,9%, sedangkan barang² industri yang diimport dari negara² Barat meningkat dengan 8%”, demikian diterangkannya lebih lanjut.

Sudah kita ketahui, bahwa karet merupakan bahan export Indonesia yang terpenting dan merupakan lebih kurang 60% dari seluruh harga export, tidak termasuk minjaktanah dan hasil²nja. Pernah kita mengalami „zaman keemasan” dimana baik volume maupun harga karet mentjapai puncaknya, jaitu dalam tahun 1951: export karet berdjumlah 750.000 ton dengan harga 59,07 sen dolar setiap pon atau 118,14 sen dolar AS setiap kg. Djadi nilai export karet kita pada waktu itu ialah: $750.000.000 \times 118,14$ sen dolar = AS \$ 886,05 djuta. Ini adalah suatu djumlah yang djauh lebih besar dari seluruh nilai export kita dalam tahun 1962 sebesar AS \$ 465,77 djuta, tidak termasuk nilai export minjaktanah.

Akan tetapi kaum imperialis internasional dengan Amerika Serikat sebagai kepalanja, tidak sebegitu bodoh untuk membiarkan „zaman keemasan” di Indonesia itu berlangsung lebih lama, meskipun „zaman keemasan” itu ditandai oleh menggelombangnya kekuasaan reaksioner Kabinet Sukiman yang sangat terkutuk dengan MSA dan razia-Agustusnja itu. Sebab baru dua tahun kemudian jaitu pada tahun 1953, volume export karet telah merosot menjadi lebih kurang 710.000 ton dengan harga rata² 24,23 sen

dolar setiap ponnja. Djadi dalam tempo 2 tahun sadja nilai export karet kita sudah turun dengan \$ 542 djuta, jaitu dari \$886,05 menjadi \$ 344,06 djuta. ($= 710.000.000 \times 2 \times 24,23$ sen dolar). Ini adalah salahsatu tjontoh yang sangat kongkrit, gamblang dan djelas dari pengalaman kita dulu 10 tahun yang lalu mengenai praktek² djahat dari kaum monopoli internasional dibidang export karet.

Nilai yang terendah daripada export karet dalam tahun 1953 jaitu tahun resesi Amerika Serikat, kini kita djumpai kembali jaitu \$ 305,33 djuta dalam tahun 1961 dan \$ 298,53 djuta dalam tahun 1962.

Angka² lengkap untuk tahun 1963 belum tersedia, akan tetapi menurut tjatatan² harga² internasional, harga karet dalam bulan Agustus tahun 1963 yang lalu telah meluntjur kebawah dengan tjepatnja jaitu sampai 23 sen dolar AS, sedangkan harga dalam bulan Djuli tahun 1960 masih tertjatat 45 sen dolar setiap pon.

Kalau kita ambil gambaran sebagai keseluruhan, maka nilai export Indonesia dalam tahun 1962, telah merosot dengan lebih kurang \$ 67 djuta, dibandingkan dengan tahun 1961, jaitu dari \$ 532,7 menjadi \$ 465,7 djuta, tidak termasuk nilai export minjak tanah dengan hasil²nja. Turunnja nilai export ini disebabkan terutama karena turunnja nilai export bahan² penting kita seperti karet, kopra, kopi, teh, tembakau dan kelapa sawit (dari angka² BPS yang diumumkan pada tanggal 21 Mei dalam surat kabar² di Djakarta).

Di-tiap² negara yang baru berkembang dan ekonomis masih sangat tergantung pada dominasi kapitalisme monopoli internasional, maka sudah menjadi hukum, bahwa perkembangan export selalu mentjerminkan perkembangan import. Kalau kita memeriksa angka² terakhir mengenai perkembangan import kita, maka ternyata, bahwa import selama pertengahan pertama tahun 1963 djauh lebih merosot dibandingkan dengan angka² selama periode yang sama dalam tahun 1962, dan merosotnja memang tidak tanggung² jaitu dari Rp. 15,134 milyar menjadi Rp. 9,766 milyar, atau dihitung dalam AS \$ berdasarkan kurs 1 \$ = Rp. 45,— dari \$ 336,31 djuta menjadi \$ 217,02 djuta. Djadi dalam satu tahun merosot dengan Rp. 5,368 milyar atau sama dengan \$ 119,29 djuta.

Diantara golongan² barang² import yang nilainja menjadi berkurang selama periode yang sama ialah golongan² barang² esensial, jaitu nilai import barang² baku dan penolong, barang² modal dan spare-parts, yang berkurang dengan Rp. 3.378 milyar atau sama dengan \$ 75,07 djuta.

Gambaran tentang perkembangan import itu memang belum mentjerminkan sepenuhnya keadaan seluruh tahun 1963 dibandingkan dengan keadaan seluruh tahun 1962, akan tetapi sudah tjukup memberikan kejakinan kepada kita betapa sulitnya dan seretnya proses perkembangan produksi dalam negeri yang masih sangat tergantung pada import barang² baku, penolong, spare-parts dan barang² modal dari luar negeri, lebih² djika kita ketahui, bahwa persediaan devisen untuk barang² tersebut dalam tahun 1962 sudah berkurang menjadi 20-25% dari jumlah yang dibutuhkan dalam keadaan „normal“.

Sangat berkurangnya import barang² esensiil itu ditambah lagi dengan ber-bagai² matjam faktor² penghalang dalam negeri, seperti korupsi, birokrasi, tidak atau kurang teguhnya dilaksanakan garis² Manipol dibidang produksi, misalnja kurangnya usaha² untuk mengembangkan tenaga² produktif Rakjat pekerdja, sudah tentu membawa akibat sangat merosotnya produksi dalam negeri. Dan djika hal ini terjadi seperti sekarang ini, dalam keadaan terdjadinja pengeluaran² keuangan negara yang kurang produktif, maka sudah pasti menimbulkan akibat² yang sangat mendalam atas seluruh perkembangan ekonomi nasional kita. Djelaslah, kemantjatan di banjak sektor produksi dan distribusi, dalam keadaan terdjadinja pengeluaran² negara yang tidak seimbang dengan kemampuan riil daripada aparat produksi ditambah lagi dengan pentjolongan² oleh kaum kapitalis birokrat, gerakan subversi dan musuh lainnya dibidang ekonomi telah membawa akibat menghebatnja inflasi terbuka, dan dengan begitu sangat merosotnja dajabeli Rakjat pekerdja, baik sebagai produsen, maupun sebagai konsumen. Dan apa yang dinamakan „disparitet“, jaitu perbedaan antara kurs resmi dan kurs riil, antara harga resmi dengan harga spekulatif, adalah se-mata² suatu akibat daripada suatu proses ekonomi yang bersumber pada faktor² fundametil luar dan dalam negeri yang tidak dapat diatasi dengan djalan moneter-teknis yang konvensional dan tradisionil sadja.

Djelaslah, bahwa konsep politik moneter kaum kapitalis monopoli yang disalurkan lewat IMF (International Monetary Fund) atau DMI (Dana Moneter Internasional) yang pada pokoknja menuntut tindakan² devaluasi dan liberalisasi harga, tidak mungkin dan tidak akan mungkin memberikan djalan keluar yang definitif, djuga apabila politik itu didukung oleh „bantuan“ luar negeri dari AS yang beratus-ratus djuta dolar djumlahnja. Ini dibuktikan oleh pengalaman² kita sendiri, oleh pengalaman dari berbagai negara tergantung di Asia-Afrika-Amerika Latin yang sangat tragis tentang terus merosotnya keadaan perekonomian mereka meskipun

sudah menerima „bantuan“ ratusan djuta dolar dari IMF, IBRD (International Bank For Reconstruction And Development) dan US EXIM BANK.

Dengan begitu menjadi jelas djuga, bahwa mengubah Peraturan² 26 Mei hanya dengan memindah-mindahkan barang² dari golongan yang satu ke golongan yang lain tidaklah akan mendatangkan perbaikan² yang berarti, dan sebaliknya malahan bisa menimbulkan kesulitan² baru yang tidak mudah diatasi.

Djalan satu²nja untuk mengikis habis sisa² imperialisme dibidang perdagangan luar negeri adalah mengubah setjara prinsipil praktek² politik perdagangan luar negeri sekarang ini, dan dengan konsekwen mengikuti garis yang telah ditetapkan oleh Presiden Sukarno dalam MANIPOL dan pedoman² pelaksanaannya, antara lain APP (Amanat Presiden tentang Pembangunan) jaitu memperluas perdagangan luar negeri RI dengan negara² NEFO, chususnya dengan negara Asia-Afrika dan Amerika Latin atas dasar saling menguntungkan.

Dan untuk dapat merealisasi setjara konsekwen garis Manipol dibidang perdagangan luar negeri, maka adalah sjarat mutlak untuk meninggalkan buat se-lama²nja politik liberalisasi dibidang export-import dengan mengadakan export-import planning yang berentjana sebagai bagian daripada seluruh pembangunan ekonomi nasional berentjana.

Dan djika Presiden Sukarno sudah menginstruksikan untuk menjingkirkan oknum² anti-Manipol dibidang kehakiman, maka sangat diharapkan agar Presiden djuga memerintahkan rituling organisasi dan personalia dengan menjingkirkan elemen² yang busuk dan reaksioner, terutama elemen² PSI-Masjumi dengan badju baru, dari seluruh aparatatur perekonomian dan keuangan, cq aparatatur export-import dan perdagangan dalam negeri.

Jang perlu mendapat perhatian segera, adalah tindakan² dibidang export-import dan dibidang perdagangan dalam negeri atau bidang distribusi nasional sebagai berikut :

Export-import

- a. Export barang² penting, jaitu barang² produksi keras dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah. Disamping barang² keras ada pula barang² lemah yang kini dikuasai oleh negara yang dengan sendirinja tetap diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Dengan PDN yang telah diretul seefektif mungkin maka Pemerintah membeli barang² export penting langsung dari produsen dengan harga : Ongkos produksi ditambah keuntungan

produsen. Tjabang² PDN yang ditundjuk untuk itu melakukan perdagangan pengumpulan dan mengurus kelantjaran pengangkutan ke-pelabuhan² export.

- c. Dalam rangka memenangkan konfrontasi ekonomi terhadap „Malaysia” maka pasaran barang² export harus dapat dipindahkan di Indonesia. Untuk itu harus diutamakan melajani pembeli² luarnegeri yang langsung mengambil barang² export kita di Indonesia, baik melalui persetudjuan² dagang bilateral maupun yang bersifat pembelian² bebas. Harus dibentuk **trade centres** disekitar pelabuhan² besar dengan fasilitas² yang tjukup dan efisien untuk melajani lalu lintas pelajaran yang meningkat.
- d. Dalam penjederhanaan pungutan² atas import dan meringankan beban bagi konsumen dan produsen maka semua **pungutan sedjonis HPN dihapuskan** dan hanya diadakan pungutan berupa bea masuk. Barang² golongan I sekarang ditambah dengan benang tenun dan tekstil kasar dan untuk ini berlaku perhitungan kurs dasar 1 \$ = Rp. 45,— serta dikenakan bea masuk sebesar 50% harga c.i.f.
- e. Barang² golongan II dikenakan bea masuk sebesar 100% dari harga c.i.f. berdasarkan kurs dasar 1 \$ = Rp. 45,— Termasuk dalam barang² golongan II adalah bahan² baku dan penolong, spare-parts, bahan² bangunan, barang² modal berupa mesin², truk², bus² dan sebagainya.
- f. Barang² golongan III dikenakan bea masuk 30 kali c.i.f. berdasarkan kurs dasar 1 \$ = Rp. 45,— Barang ini terdiri dari barang² mewah. Penggolongan barang² golongan III yang ada sekarang perlu ditinjau kembali karena masih banyak diantaranya terdapat barang² yang mestinja tidak tergolong barang² mewah misalnja paku dan lainnja.
- g. Import barang² penting yang sekarang sudah dikuasai oleh Pemerintah tetap dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan PDN² yang telah diritul sebagai aparat yang efektif dalam penjaluran barang² dan pelaksanaan import. Barang² import untuk keperluan sektor² negara semuanya disalurkan oleh PDN² yang telah diritul tanpa menggunakan perantara² lain. Pemerintah mengutamakan import barang² modal, bahan² baku dan penolong yang dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri terutama pertanian, perkebunan dan pertambangan dan mendorong perkembangan industri.

Aparat² Distribusi Negara

- a. Untuk mengkordinir export-import dan menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berentjana dibentuk **Dewan Export-**

Import yang komposisinja mentjerminkan kegotongrojongan nasional poros Nasakom. Ia merupakan aparat Kabinet. PDN² melaksanakan kebidjaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Export-Import yang tidak boleh bertentangan, tetapi harus sesuai dengan kebidjaksanaan djangka pendek yang ditempuh oleh Kabinet berdasarkan Deklarasi Ekonomi.

- b. Untuk mengkordinir peredaran barang² perdagangan didalam negeri perlu dibentuk **Dewan Distribusi Nasional** yang komposisinja mentjerminkan kegotongrojongan nasional poros Nasakom. Alokasi barang² ke-daerah² serta ke-sektor² tertentu setjara berentjana ditugaskan kepada Dewan tersebut dengan berpegangan pada prinsip penjaluran yang tjepat, aman dan murah. Semua alokasi diumumkan setjara terbuka.

Tentang harga dan tarif

- a. Setelah diadakan rituling aparatatur setjara integral maka sebagai langkah pertama perlu diadakan tindakan² penurunan tarif setjara efektif. Menurunkan kembali ongkos pengangkutan darat, laut dan udara, menurunkan harga barang² konsumsi pokok dengan membatalkan PP 26 Mei No. 20 tahun 1963, dan menjalurnjannja melalui distribusi lewat koperasi², RT² dan warung² yang ditundjuk untuk itu. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri diroboh sehingga ketentuan yang memungkinkan penggantian dengan uang dihapuskan.
- b. Pada pokoknja Pemerintah harus tetap memegang teguh kebidjaksanaan untuk melaksanakan garis pengendalian harga dengan menetapkan harga barang² konsumsi, barang² modal, bahan² baku dan penolong :
 - (a) untuk barang² import harga „landed cost” ditambah dengan ongkos pengangkutan, ongkos administrasi badan² distribusi negara, ditambah dengan keuntungan maksimum 20% dari harga „landed cost”.
 - (b) untuk barang² hasil produksi dalam negeri harga pendjual-an pabrik ditambah dengan keuntungan maksimal 15%, belum termasuk ongkos² transport dan administrasi badan² distribusi negara dan
 - (c) koperasi², warung² dan RT mendjual barang² kepada konsumen dengan harga yang harus dibajarnja kepada badan² distribusi negara, ditambah dengan ongkos administrasi dan

keuntungan maksimum 10% dan ditambah dengan ongkos transport.

Barang² yang menurut Ketetapan MPRS ditentukan untuk distribusi Rakjat, seperti beras, tekstil, gula, minjaktanah, minjakkelapa, sabun, dan lain² harus tetap disalurkan oleh Pemerintah lewat aparat² distribusi Pemerintah, koperasi², RT² dan warung² dengan tjara terbuka sehingga memungkinkan kontrol dari bawah dan dari atas.

IV

ATASI KRISIS BERAS

Ber-kali² Presiden Sukarno telah menekankan betapa penting dan vitalnya masalah produksi, masalah „perut negara“ dalam semangat dan nada, bahwa produksi menentukan mati atau hidupnya negara, tanpa produksi negara akan gulungtikar.

Seiring dengan djalan pikiran Presiden Sukarno ini, maka telah mendesing suara² dikalangan Rakjat, bahwa produksi bahan makanan, khususnya beras, adalah „perutnya Rakjat“, tanpa beras, Rakjat akan kelaparan dan dengan begitu akan terantjam oleh manjam² bahaya fisik dan mental yang dapat membawa maut padanya. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa masalah bahan makanan, khususnya beras merupakan satu²nya masalah yang harus mendapat pemetjahannya setjara urgen. Masih banjak lagi masalah lainnya yang tidak kurang pentingnya daripada masalah beras yang harus diselesaikan dalam rangka penyelesaian tuntutan² Revolusi nasional dan demokratis ini.

Krisis beras, terutama dalam keadaan Indonesia disatu fihak sedang melakukan konfrontasi mati²an terhadap neo-kolonialisme „Malaysia“ dengan imperialisme Inggris dan Amerika Serikat sebagai dalangnya, dan difihak lain sedang berdjuaug menggangu kesulitan² ekonomi, merupakan suatu masalah yang tidak dapat ditunda² lagi pemetjahannya.

Dekon telah menetapkan, bahwa „Pemerintah harus mempunyai dan menguasai apa yang dinamakan 'iron stock' beras“ dan ini pada pokoknya berarti bahwa Pemerintah setiap waktu harus dapat menguasai persediaan beras yang dapat digunakan untuk sedapat mungkin mempertahankan harga beras akibat perdagangan spekulasi.

Tentang masalah pelaksanaan „iron stock“ beras ini terdapat dua pendapat : (a) pendapat yang mengatakan bahwa masalah „iron

stock“ beras itu harus per-tama² dipetjahkan dengan djalan meng-import beras, dan (b) pendapat yang menitikberatkan pemetjahan itu pada produksi dalam negeri sendiri.

Terlepas daripada persoalan tentang maksud² tertentu yang menjadi latarbelakang daripada pendapat pertama itu, maka kita berpendapat, bahwa usaha untuk mendjamin persediaan beras harus berdasarkan prinsip berdiri diatas kaki sendiri, berdasarkan kekuatan Rakjat Indonesia dan kekajaan alam sendiri, yaitu pertanian sebagai sumber daripada semua djenis bahan² makanan, terutama beras. Dan kita samasekali tidak boleh menggantungkan masalah beras kepada luarnegeri.

Kaum sinisi selalu mengedjek dan meremehkan kemungkinan² untuk dapat memproduksi sepenuhnya volume beras yang kita butuhkan. Mereka menjebarkan ratjun berbisa, bahwa target MPRS „terlalu tinggi“, „tidak realistis“ dan tidak akan mungkin tertjapai.

Kepada kaum sinisi ini kita hanya bisa mendjawab, bahwa target MPRS bukanlah suatu target yang chajal, akan tetapi sebaliknya suatu target yang riil dan dapat diwujudkan, asalkan dapat dipenuhi sjarat² pelaksanaannya.

Memang, djika kita ikuti garis main komando²an KOGM (Komando Operasi Gerakan Makmur) yang dilaksanakan dengan gerakan SSB dan Padi Sentra dulu yang ternyata telah menjadi sentrumnya korupsi, birokrasi dan pemborosan karena sudah menghamburkan ber-miljard² rupiah uang negara dan Rakjat, maka target MPRS tidak akan mungkin tertjapai, karena meradjalelanja salahurus, karena salahduduk dan salahtundjuk dari kaum kapitalis birokrat. Akibat daripada „Tiga Salah“ ini, maka telah terdjadi pelanggaran² yang kasar atas prinsip² demokratis yang telah ditetapkan dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannya terutama APP, Resopim dan Tahun Kemenangan. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dari fakta² sebagai berikut :

- a. Djatah produksi menurut Ketetapan II/1960 MPRS, adalah sebanyak 20,4 djuta ton padi atau 10,2 djuta ton beras untuk tahun 1962, sedangkan kebutuhan untuk tahun itu, termasuk 3% bufferstock ditetapkan 10.000.682 ton beras sehingga menurut rentjana akan terdapat kelebihan 150.000 ton.
- b. Target itu akan ditjapai dengan suatu rentjana menaikkan produksi :

1. Padi Sentra dengan areal seluas 3 djuta ha bertugas menambah hasil produksi sebanyak 1.350.000 ton beras. Djatah areal ini tidak tertjapai seluruhnya, akan tetapi hanya

sebagian saja seluas 1,7 djuta ha dan areal inipun tidak seluruhnya bisa menggunakan pupuk yang telah direntjanakan, karena pupuk itu tidak sampai pada alamatnya, menjadi mangsa daripada hama „tikus kaki dua“, dan karena pupuk itu belum dikenal oleh kaum tani yang berkepentingan. Dengan begitu, maka Padi Sentra telah gagal dalam menjalankan tugas melaksanakan target MPRS.

2. Apa yang dinamakan „intensifikasi massal“, meliputi 2 djuta ha, mempertinggi hasil produksi dengan 500.000 ton beras; usaha ini sulit dikontrol hasilnya. Hanya dapat dikehendaki disini bahwa sampai permulaan tahun ini, luas tanah yang menggunakan bibit unggul tidak lebih dari 30% dari seluruh tanah tanaman padi seluas 7,3 djuta ha.
3. Saluran detail di Djawa meliputi 17.500 ha, menambah hasil produksi dengan 19.250 ton beras, akan tetapi hasilnya belum diketahui ketjujalin kenyataan bahwa banjir waduk yang matjet, disebabkan karena saluran sekunder maupun tertier belum selesai dibangun.
4. Seksi I Djatiluhur meliputi 60.000 ha, menambah hasil produksi dengan 66.000 ton beras, tambahan ini masih tetap dalam rentjana diatas kertas, belum dapat direalisasi, karena saluran induknya belum selesai.
5. Pembukaan sawah kering seluas 500 ha belum dapat memberikan hasil yang direntjanakan sebanyak 250 ton, karena salahurus, malahan proyek itu perlu diselamatkan karena sampai permulaan tahun ini mesin combinenya belum juga muntjul di Kalimantan, masih di Surabaya atau mungkin sedang dalam perjalanan ke Kalimantan.
6. Intensifikasi padi ladang dan gogo meliputi 1 djuta ha, dengan tambahan hasil produksi 100.000 ton, mengenai hal ini belum ada laporan lengkap.

Djelaslah, bahwa bukan saja SSB dan Padi Sentra tidak dapat mentjapai target yang telah ditetapkan oleh MPRS, akan tetapi sebetulnya juga tidak mungkin ditetapkan angka yang pasti tentang hasil yang telah ditjapainya. Dan inilah sebabnya mengapa angka produksi padi tahun 1962 bersimpang-siur: angka dari BPS berbeda dengan angka Departemen Pertanian dan Agraria, dan berbeda lagi dengan angka Departemen Research Nasional. Djadi rupanya bidang pengumpulan angka juga telah dihindangi oleh salahurus yang berakibat luas, karena bahan dari BPS justru sangat dibutuhkan bagi perentjanaaan pembangunan nasional.

Orang boleh ber-lomba dengan pengumuman angka produksi padi untuk tahun 1963, akan tetapi angka diatas kertas, apakah

kertas ini dari BPS, dari Departemen Pertanian dan Agraria, dari Departemen Research Nasional atau Departemen lainnya, samasekali tidak dapat menolong krisis beras yang sangat kritis ini.

Lebih sesudah berlakunya Peraturan² Ekonomi 26 Mei, ditambah lagi dengan berbagai² matjam faktor lain, seperti hama tikus, musim kemarau yang agak panjang, maka sudah terang tidaklah mungkin bagi aparat dan personalia serta organisasi Departemen Pertanian dan Agraria dan Departemen² lain yang bersangkutan, untuk dapat memenuhi tugasnya merealisasi target MPRS tahun 1963 dengan baik dan tepat pada waktunya.

Bahwa target² produksi padi MPRS bukanlah target² yang chajal dan fiktif, dapat dibuktikan antara lain dari perhitungan ilmiah yang telah dibuat oleh lembaga Penelitian Padi Dan Djenis² Gandum lainnya. Untuk tahun 1963 misalnya diperlukan produksi padi sebanyak 21.401.264 ton, terdiri dari produksi untuk konsumsi 20.117.275 ton, untuk bufferstock 5%, untuk bibit sawah 190.625 ton dan bibit ladang 87.500 ton. Dengan memperhitungkan kemungkinan² timbulnya kerusakan sebanyak 10%, maka diperlukan produksi kotor $10/9 \times 21.401.264 = 23.779.183$ ton. Berdasarkan penggunaan areal padi sawah seluas 6.100.000 ha dan areal padi ladang seluas 1.400.000 ha, dengan matjam² kemungkinan kerusakan, penggunaan untuk tanaman tebu, dan lain² maka dapatlah diperhitungkan, bahwa rentjana produksi MPRS untuk tahun 1963 dapat dipenuhi dengan suatu target rata² 1,6 ton setiap ha ladang dan rata² 41,7 kwintal setiap ha sawah setahun.

Dan kesimpulan ini adalah realistis, asal saja dapat dipenuhi syarat² politik, organisasi dan personalia yang mentjerminkan kegotongrojongan nasional Nasakom, tehnik pertanian yang dipimpin dan bersandar kepada dajatipta kaum tani dengan melaksanakan sungguh² UUPA dan UUPBH dengan mengutamakan kepentingan kaum tani dan dengan memberikan kebebasan² demokratis kepada kaum tani.

Berhubung dengan kegagalan yang telah dialami oleh gerakan SSB, Padi Sentra, dan lain², maka Rakjat terutama kaum tani berhak menuntut agar pedjabat yang bertanggungjawab mengumumkan setjara diperintji hasil² usaha SSB, Padi Sentra dan lain² dan menuntut agar mereka yang telah berbuat tjurang, melakukan korupsi, menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan garis² Manipol, diritil dan didjatuhi hukuman setimpal. Padi Sentra sudah dibubarkan, dan sekarang mendjelma menjadi Pertani dan Mekanis, yang menurut pengalaman juga telah menghamburkan² banyak devisa, antara lain karena telah banyak traktor yang telah

didatangkan dari luarnegeri hampir semuanya nongkrong dan menjadi besi tua.

Krisis beras sekarang ini sudah sangat akut. Dibanjak daerah telah timbul penjakit busunglapar, beberapa djuta manusia di Jawa misalnja telah menundukkan tanda² terdjangkit oleh bahaya kelaparan, dibanjak tempat orang sudah tidak bisa lagi makan beras, dan terpaksa makan ampas ubi, gaplek dan lain². Krisis beras disebabkan oleh ber-bagai² faktor :

- (a) salahurus jang sudah meradjalela dan keterlaluhan dalam lingkungan aparatur dan pedjabat jang bertugas melaksanakan target² produksi beras jang ditetapkan oleh MPRS ;
- (b) salahurus jang meradjalela dan keterlaluhan dalam lingkungan aparatur dan pedjabat² pusat dan daerah jang bertanggungjawab atas pelaksanaan UUPA dan UUPBH ;
- (c) meradjalelanja perdagangan spekulasi, matjetnja aparat distribusi dan gagalnja pembelian padi ;
- (d) teror Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang berakibat semakin membubungnja harga beras, merosotnja dajabeli Rakjat pekerdja, terutama kaum tani, dan meningkatnja ongkos² produksi bahan² pertanian terutama beras ;
- (e) tidak adanya kesedaran dan keinsjafan daripada pedjabat² tinggi jang bertanggungjawab untuk mempertinggi produksi dan mendjamin persediaan beras berdasarkan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dan karena itu lebih banjak bersandar pada import beras jang memang merupakan djalan paling mudah dan enak karena bisa membawa keuntungan bagi diri pribadi ;
- (f) gerakan subversi dan sabotase dari kaum reaksioner, bekas² Soska-Masjumi, kaum Manipolis dan Dekonis munafik jang berhasil menjelundup dalam badan² ekonomi dan keuangan negara, dan jang masih dapat bergerak dengan leluasa di-tengah² masjarakat Indonesia ;
- (g) penimbunan² beras oleh kaum kapitalis birokrat, tuantanah dan kaum penghisap besar lainnja dikota dan didesa.

Pelaksanaan UUPA dan UUPBH jang dalam batas² tertentu dapat mendorong perkembangan tenaga produktif kaum tani, dan karena itu bisa memberikan sumbangan besar bagi usaha Pemerintah untuk memperbesar produksi bahan² makanan, chususnja beras, ternjata matjet samasekali.

Menurut keterangan Drs. S. Kasidi jang dimuat dalam **Suluh Indonesia** tanggal 21 Mei 1963 luas tanah seluruhnja jang sudah dan akan di-bagi²kan kepada kaum tani adalah 713.472 ha, terdiri dari tanah kelebihan dari batas maksimum seluas 425.654 ha, tanah

bekas swapradja 71.000 ha, tanah jang langsung dikuasai oleh negara 189.000 ha dan tanah guntai 27.818 ha. Menurut Laporan Menteri Sadjarwo SH kepada Sidang Panitia Landreform Pusat pada tanggal 18 September 1961 luas tanah jang dapat di-bagi²kan kepada kaum tani seluruhnja adalah 1 djuta ha, sedangkan menurut keterangan MP Ir. H. Djuanda almarhum didepan sidang DPR-GR tanggal 5 Djuli 1962, luas tanah² kelebihan dari batas maksimum adalah 401.386 ha, terdiri dari sawah 159.883 ha, dan tanah kering, termasuk tambak, 241.503 ha.

Menurut keterangan terachir, maka meskipun belum dapat dipastikan kebenarannja berhubungan dengan simpangsiurnja angka² jang diumumkan oleh Pemerintah, tanah kelebihan batas maksimum jang telah di-bagi²kan adalah 19.476.799 ha djadi kurang dari 5% daripada luas tanah melebihi batas maksimum, atau djika dipakai sebagai dasar luas tanah seluruhnja jaitu 1 djuta ha, maka sesudah 3 tahun landreform berdjalan tanah kelebihan jang sudah dibagikan tidak sampai mentjapai angka 2%, dan banjak diantaranya jang djatuh ketangan penggarap² gelap.

Banjak tindakan² dari pedjabat² daripada aparatur agraria di pusat dan di-daerah² telah sangat menghambat atau membikin matjetnja pelaksanaan UUPA dan UUPBH, tindakan² jang merugikan kaum tani dan menguntungkan tuantanah, seperti misalnja :

- (1) Belum disemua Daswati I dan Daswati II telah terbentuk Panitia Landreform, dan masih ada Panitia Landreform Daswati I jang tidak mengikutsertakan wakil kaum tani jang wadjar dan progresif jaitu BTI. Sedangkan disebagian terbesar Ketjamatan² dan Desa² belum terbentuk Panitia Landreform.
- (2) Panitia² Landreform jang sudah terbentuk belum dapat memenuhi tugas jang ditetapkan dalam Kepres No. 131 tahun 1961, dan pada umumnja impoten atau malahan dibekukan samasekali oleh Ketua Panitia/Kepala daerah.
- (3) Sementara pedjabat Departemen/Djawatan Agraria dan Ketua Panitia Landreform melindungi tuantanah jang tidak melaporkan tanahnja dengan menggunakan sistim „kedok” perseorangan atau „mewakafkan” dan „menghibahkan” tanahnja ; tidak segera mensahkan sebagai hak-milik kaum tani, tanah² jang sudah dikuasai oleh negara, jaitu tanah² bekas Swapradja, kehutanan, perkebunan, tanah-partikelir, tanah RVE dan sebagainya.
- (4) Dibanjak tempat telah dilakukan tindakan² salahbagi, jang bertentangan dengan Ketentuan² PP No. 224 tahun 1961

jaitu membagikan tanah bukan kepada kaum tani penggarap tanah yang berhak, akan tetapi kepada „kaum tani” bukan penggarap tanah.

- (5) Dibanjak daerah tuantanah dibiarkan atau malahan „dibantu” melawan pelaksanaan UUPBH, dan sebaliknya kaum tani yang mempertahankan tanah garapan tidak djarang dituntut kedepan pengadilan dengan alasan „merampas tanah hak milik orang lain”.

Tentang perkembangan daripada pelaksanaan UUPBH dapat diterangkan, bahwa dari lebih kurang 1 djuta surat perdjandjian bagihasil yang diperkirakan sudah harus selesai dikerdjakan, baru lebih kurang 43.000 surat yang sudah selesai, djadi baru 4,3% dari djumlah surat² seluruhnja.

Kematjetan pelaksanaan UUPA dan UUPBH setjara politik dan ekonomis, bukan sadsa merugikan pemerintah sendiri, akan tetapi djuga merugikan kaum tani, merugikan Revolusi dan hanja menguntungkan tuantanah dan kakitangan²nja, kaum tengkulak, kaum kapitalis birokrat, dan kaum reaksioner kontra-revolusi. Menurut perhitungan, Pemerintah telah kehilangan lebih kurang 1,25 djuta ton padi akibat matjetaja pelaksanaan UUPA, berupa setoran sewa sebanjak 12,5 kwintal padi setiap ha setahun.

Untuk melantjarkan djalan pelaksanaan UUPA dan UUPBH, maka saja menjokong sepenuhnya tuntutan Partai yang telah dikemukakan dalam Laporan Politik Kawan Ketua jaitu perombakan organisasi, rituling aparatatur dan personalia bagian² tertentu Departemen/Djawatan Pertanian dan Agraria, dan mempertjepat pembentukan Panitia² Landreform sampai ke-Ketjamatan² dan Desa² yang mentjerminkan kegotongrojongan nasional yang berporoskan Nasakom.

Selama landreform matjet seperti sekarang ini, maka tugas² untuk meningkatkan produksi pangan, chususnja beras dan untuk melaksanakan pembangunan berentjana akan mendjadi omongkosong belaka.

Tugas yang urgen harus segera dikerdjakan oleh Pemerintah sekarang ini untuk mengatasi krisis beras adalah memobilisasi Rakjat lewat Front Nasional Pusat dan Pemerintah sampai ke-daerah² dan desa² untuk membebaskan persediaan beras yang masih tertimbun dalam gudang² dan tempat² lainnja di-kota² dan di-desa² dari penguasaan dan penggunaan oleh tuantanah, kaum kapitalis birokrat, kaum spekulan dan kaum penghisap besar lainnja, guna menguasai sepenuhnya persediaan beras itu. Dan Rakjat sendiri dengan melalui Front Nasional setempat harus bergerak untuk menggunakan persediaan padi dan beras itu yang berada

ditangan tuantanah dan tanikaja yang berlebihan, sebagai pin-djaman tanpa bunga, terutama untuk makan dan bibit. Kepala desa setempat harus didorong untuk mengambil tindakan seperlu-nja melegalisasi tuntutan Rakjat itu.

Disamping itu Pemerintah harus tetap mendjamin distribusi beras kepada seluruh pegawai negeri dan pekerdja harian negara, memberikan segera „injeksi” beras dan bibit kepada daerah² yang menderita dan kepada penduduk kota² besar diseluruh Indonesia. JUBM harus diritul sampai ke-akar²nja mendjadi suatu Badan Pembelian Padi yang demokratis dan bertugas untuk mendjamin kelantjaraan pembelian padi.

Susunan organisasi dan personalia Badan Pembelian Padi dari Pusat sampai ke-desa² harus mentjerminkan komposisi kekuatan Nasakom, penentuan djatah pembelian dan harga padi ditetapkan berdasarkan musjawarah dan harga umum setempat dan dapat dibayar dengan uang atau dalam bentuk barang² kebutuhan pokok kaum tani, seperti tekstil, gula, minjak kelapa, minjak tanah, alat² pertanian dan lain².

Pemerintah seharusnya djuga mendjamin pemasukan padi bagi penggilingan² beras dengan menetapkan djatah kapasitas penggilingan semaksimal mungkin, dengan memberikan bantuan seper-lunja berupa spare-parts, dan lain² untuk melantjarkan dan meningkatkan kapasitas² pabrik² penggilingan.

Sudah tentu, untuk dapat merealisasi persediaan beras Pemerintah, untuk sementara dapat disetudjui usaha membeli beras dari luarnegeri. Kita harus tetap waspada terhadap permainan politik kaum imperialis, terutama Amerika Serikat yang berusaha mendjadi soal kekurangan beras sebagai suatu alat politik untuk merongrong kedaulatan dan kebebasan RI.

Djalan yang paling praktis dan menguntungkan bagi Pemerintah ialah dengan mengadakan perdjandjian clearing dengan negeri² Nefo dimana RI untuk suatu djangka waktu tertentu dapat mendjual barang² hasil exportnja, seperti misalnja karet, kopra, dll. untuk dibayar kembali dengan beras.

Diatas se-gala²nja harus ditjegah agar soal import beras djangan sampai mendjadi objek perdagangan spekulasi.

Berdasarkan keterangan diatas, maka harus segera diambil tindakan² urgen dalam usaha mengatasi krisis beras sebagai berikut :

- a. Dalam rangka usaha mendjamin persediaan beras dalam tempo yang pendek, Pemerintah ber-sama² dengan Rakjat yang terorganisasi supaya mengadakan gerakan pengumpulan beras dengan menguasai penimbunan beras dari tuantanah, tani kaja yang

berlebihan dan kaum spekulasi di-kota² dan di-desa² dengan sjarat² tertentu yang bisa ditetapkan lebih landjut dan supaya mengambil tindakan keras terhadap mereka yang menolak pemeriksaan alat² negara bersama dengan Rakjat atas tempat² penjinpanan beras.

- b. Dalam keadaan yang mendesak, Rakjat supaya menuntut agar persediaan padi dan beras setempat milik tuantanah, tani kaya yang berlebihan dan golongan beruang lainnya dapat digunakan untuk makan dan bibit sebagai pinjaman yang tidak berbunga. Kepala desa atau kampung melegalisasi tindakan Rakjat itu dan membantu kelantjaran serta ketertiban dalam pekerjaan mem-bagi²kan beras.
- c. Adakan kampanye di-tempat² pendjualan beras untuk menginsjafkan pedagang² beras agar tidak masuk dalam perangkap tukang² tjatut besar dan mendjual berasnya dengan harga yang pantas.
- d. Lantjarkan dan djamin distribusi beras kepada semua pegawai dan pekerdja negeri, buruh perusahaan negara/swasta dan kepada penduduk di-kota² besar yang sampai sekarang sudah biasa mendapat pembagian beras; kepada pekerdja negeri dan kaum buruh yang mendapat distribusi beras kurang dari 8 kg setiap djiwa sebulan atau tidak mendapatkan distribusi sama-sekali, supaya diberikan pembagian beras 8 kg setiap djiwa sebulan; berikan pertolongan dalam bentuk indjeksi beras kepada daerah² yang sedang menderita kekurangan beras dan terantjam oleh bahaya kelaparan atau bahaya penyakit busung-lapar.
- e. Ritus JUBM dan bentuk badan² Pembelian Padi yang demokratis dan berkomposisi Nasakom. Tetapkan djatah pembelian padi atas dasar musjawarah dan harga pembelian padi pada tingkat harga umum setempat dan lakukan pembajakan juga dalam bentuk barang² kebutuhan pokok kaum tani, sesuai dengan isi dan djiwa Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961.
- f. Adakan persetudjuan „Clearing“ dengan negeri² Nefo untuk dapat mendjamin import beras selama waktu tertentu dengan pembajakan dengan hasil² export bahan² mentah kita, seperti karet dan timah.
- g. Ritus personalia Djawatan Agraria, dan anggota² serta Ketua² Panitia Landreform yang tidak aktif dan djamin agar semua Panitia Landreform dari pusat sampai kedaerah berporoskan Nasakom, untuk melantjarkan pelaksanaan UUPA dan UU-PBH, karena tanpa landreform tidaklah mungkin kesulitan² ekonomi teratasi.

ATASI KEMATJETAN PRODUKSI DAN KOMUNIKASI

Dalam keadaan negara sedang menghadapi banyak kesulitan dibidang moneter, maka setiap kemerosotan produksi dan kematjetan komunikasi membawa akibat lebih menjulitkan lagi situasi moneter. Telah kita ketahui semua, bahwa pengeluaran negara untuk keperluan² yang tidak produktif adalah besar, sedangkan disamping itu sedjak beberapa tahun belakangan ini, harga bahan² export kita dipasaran dunia internasional sangat merosot. Dengan bertambahnya uang yang beredar dan bersamaan dengan itu merosotnya produksi di hampir semua sektor membawa akibat bahwa jumlah volume uang yang beredar jauh lebih besar daripada volume peredaran barang, dan ini merupakan salahsatu faktor terpenting daripada apa yang dinamakan inflasi terbuka uang kertas, dengan segala konsekwensinya yang sangat kedjam yaitu kenaikan harga dengan lontjatan² yang tinggi dalam tempo yang pendek.

Akan tetapi sebaliknya inflasi terbuka ini lebih mendorong lagi naiknya harga barang² sandangpangan, bahan² baku dan penolong, spare-parts dan barang² lain untuk keperluan pembangunan, memerosotkan produksi dalam negeri dan mempersulit persediaan barang dalam negeri untuk keperluan masyarakat, mendorong nafsu spekulasi menjadi lebih keras, memerosotkan dajabeli (nilai tukar) rupiah terhadap barang dan jasa dalam negeri maupun luarnegeri (valuta asing), membikin tambah berat kehidupan ekonomi-keuangan Rakjat yang sudah menderita serta mematjetkan usaha² pelaksanaan pembangunan.

Disamping keterangan tentang meningkatnya defisit anggaran, meningkatnya pengeluaran routine, meningkatnya kredit bank dan meningkatnya jumlah uang yang beredar, jelas pula tentang merosotnya harga dan volume barang² export Indonesia dipasar dunia, merosotnya penerimaan devisa, meningkatnya ongkos jasa dan tarif pengangkutan internasional, tidak seimbangnja neraca pembajakan Indonesia yang dengan sendirinya akan mempengaruhi politik alokasi penggunaan devisa untuk import Pemerintah bagi keperluan pembangunan ekonomi (pertanian, perkebunan dan pertambangan sebagai sumber pembejaan pembangunan), impor² beras, import umum, pembajakan jasa-djasa, investasi modal di-bidang pembangunan dan pembajakan kembali bunga dan hutang² kepada luarnegeri.

Gambaran ini pada pokoknya menjelaskan perkembangan ekonomi-keuangan yang suram pada tahun 1962, tahun 1961 dan tahun² sebelumnya, suatu gambaran yang cukup memberikan kesimpulan betapa eratnja saling hubungan antara sektor export-import, sektor keuangan negara, sektor produksi dan komunikasi dan sektor perdagangan dalam negeri. Dan dari gambaran ini jelas pula betapa penting dan menentukannya faktor perdagangan luar-negeri bagi aktivitas ekonomi nasional kita, dan betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan moneter-konvensional yang ditujukan „untuk memperbaiki keuangan negara“, berdasarkan perkembangan perdagangan luar-negeri se-mata² dengan mengorbankan produksi disemua sektor ekonomi.

Produksi beras misalnya yang direntanakan dalam tahun 1962 sebanyak 10,2 juta ton, sehingga Indonesia akan dapat mengexport lebih kurang 150.000 ton ternyata tidak tertjapai samasekali. Sebaliknya, Indonesia malahan masih juga terpaksa mengimport beras tidak kurang dari 1,3 juta ton, dan dari sini sebetulnja sudah dapat kita perhitungkan bahwa produksi beras tahun 1962 tidak bertambah dibandingkan dengan produksi tahun 1960.

Produksi tekstil tahun 1963 menunjukkan suatu gambaran yang suram, karena alat² produksi tekstil, ATM dan ATBM hanya bekerja dengan kapasitas tidak lebih daripada 420 juta meter atau lebihkurang 60% daripada maksimum kapasitas yang semestinja dapat digerakkan. Produksi gula tahun ini menurut kabar malahan mentjapai tingkat yang jauh lebih rendah daripada yang direntanakan, dan tidak melebihi produksi tahun 1962 sebanyak 591.000 ton atau lebihkurang 69% produksi tahun 1959.

Demikianlah selanjutnja dapat dikemukakan bahwa produksi minyak kelapa hanya mentjapai lebih kurang 40% daripada kapasitas normal yang biasanya tertjapai dalam tahun² sebelum tahun 1960. Angka² daripada hasil² produksi perkebunan negara tahun 1961 jika dibandingkan dengan produksi tahun 1957 pada umumnya sangat merosot: produksi karet dalam tahun 1961 misalnya jika dibandingkan dengan produksi tahun 1957 merosot dengan 16%, gula dengan 24%, kapok bersih dengan 30%, serat dengan 30%, tembakau dengan 24%, biji sawit dengan 20,8% dan kina dengan 22,5%. Hanya produksi kopi saja telah naik selama 4 tahun itu dengan 29,33%.

Menurut catatan terakhir produksi karet perkebunan dalam tahun 1962 sangat merosot yaitu dari 216.772 ton dalam tahun 1961 menjadi 190.539 ton dalam tahun 1962, jadi merosot dengan 26.233 ton.

Angka² tentang produksi kopra tahun 1962 tidak tersedia akan

tetapi export kopra tahun 1962 sangat merosot yaitu dari 238.503 ton dalam tahun 1961 menjadi 90.400 ton dalam tahun 1962 atau merosot dengan tidak kurang dari 60%.

Produksi batubara tahun 1956 dan sebelumnya setjara nasional bergerak antara 800.000-900.000 ton akan tetapi sedjak tahun 1957 terus merosot menjadi 500.000-700.000 setiap tahunnja, dan produksi TABA di Tandjungenim yang dalam tahun 1962 direntanakan akan mentjapai 528.000 ton hanya mentjapai 300.000 ton.

Angka² produksi timah sebagai salahsatu bahan export yang terpenting juga tidak menggembirakan. Produksi tahun 1955 sebanyak 33.901 ton terus mengalami kemerosotan menjadi 22.957 ton dalam tahun 1960 dan lebih kurang 11.000 ton dalam tahun 1962, jadi dalam tempo dua tahun telah merosot dengan lebih dari 50%.

Keadaan transport dalam tahun² terakhir ini ternyata tidak dapat menjamin kelantjaran distribusi barang² sandangpangan dan bahan² untuk pembangunan proyek² yang telah direntanakan oleh MPRS. Sebagai akibat dari politik moneter yang se-mata² mendaraskan diri pada perkembangan export, maka timbul banjak kerusakan² dan stagnasi dibidang transport karena alat² pengangkutan yang sudah lama tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau memperbaharui spare-partsnja.

Dibidang perkereta-apian kita melihat misalnya lok² semakin berkurang dan banjak yang sudah tua; jumlah gerbong² barang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan banjak yang telah rusak, sedangkan rel² belum direhabilitasi.

Dalam pada itu situasi daripada kendaraan bermotor tidak kalah suramnja, pada akhir tahun yang lalu tersiar kabar, bahwa di Jawa Barat 75% daripada kendaraan umum bermotor terpaksa „digantung“ dan setjara nasional menurut taksiran tidak kurang dari 50% kendaraan umum bermotor telah nongkrong.

Pengangkutan dilaut meskipun jumlah tenaganya sudah seimbang dengan target yang ditetapkan oleh MPRS, akan tetapi ternyata masih mengalami kemacetan². Hal ini disebabkan karena terlalu banjak peraturan² yang bersimpang-siur dipelabuhan dengan akibat kurang jelasnya batas² wewenang antara kekuasaan sipil dan militer, terlalu banjaknja instansi² yang merasa diri paling bertanggungjawab, kurangnya fasilitas², seperti pergudangan, dermaga dan dok. Menurut sumber² yang dapat dipertjaja, maka hanya 50% daripada alat² pengangkutan negara dibidang maritim dapat berjalan, sedangkan yang 50% lainnya terpaksa nongkrong dengan memakan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit yaitu \$ 9

djuta setiap tahun. Akan tetapi dari djumlah kekuatan jang „dapat berlajar” itu, tidak semuanya digunakan setjara efektif. Menurut taksiran perbandingan antara djumlah kapal² berlajar dan djumlah kapal² jang terpaksa menunggu dipelabuhan adalah 1 : 2.

Jang membikin lebih gawat dan kompleksnja situasi ekonomi sekarang ini adalah kenjataan bukan sadja turunnja nilai export dengan akibat turunnja nilai import barang² modal, bahan² baku dan penolong, bukan sadja selalu ditempuhnja politik moneter konvensional jang sudah usang itu, bukan sadja kenjataan adanya pengeluaran² negara jang kurang produktif, akan tetapi djuga karena meradjalelanja penjakit salahurus. Dan salahurus atau mismanagement ini disebabkan oleh salahtundjuk dari kaum kapitalis birokrat dengan akibat salahduduknja orang² jang tidak betjus, orang² jang korup, orang² bekas Soska-Masjumi jang anti-Manipol dan anti-Dekon.

Salahurus itu jang telah meradjalela di hampir semua sektor ekonomi negara, telah meratjuni setjara ekonomi, politik dan mental perusahaan² produksi, komunikasi, perdagangan luar dan dalamnegeri, keuangan, perusahaan tjampuran, maupun bidang² organisasi distribusi jang resmi dan setengah resmi, sehingga berakibat (a) timbulnja kepintjangan² sosial dengan adanya kenjataan disatu fihak meluas dan meratjanja kemiskinan dan kesengsaraan dikalangan massa Rakjat pekerdja, dan difihak lain adanya OKB² jaitu orang² kaya baru atau orang² jang sudah „binnen” menurut istilah Presiden, dan (b) kenjataan adanya pemborosan uang, tenaga dan alat², serta ongkos produksi jang tinggi, akan tetapi tidak disertai kenaikan upah kaum buruh, dan kenaikan produksi, dan (c) meradjalelanja korupsi, pentjolengan² dan birokrasi setjara besar²an dan dalam matjam² bentuk dan manifestasinja.

Dan OKB² ini jang telah memperkaja diri dengan menggunakan atau lebih tepat lagi mensalahgunakan kedudukannja dengan akibat²nja seperti disebutkan diatas, adalah orang² jang oleh umum dan terutama dikalangan kaum buruh terkenal dengan istilah kaum kapitalis birokrat, baik militer maupun sivil. Kaum kapitalis birokrat ini, sangat dihinggapi oleh komunisto-phobi, buruh-phobi, Rakjat-phobi, dan phobi² lainnja, jang kerdjanja mengekang hak² demokratis, dan dengan begitu sangat menghambat atau menghalang²i perkembangan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani. Mereka karenanja adalah reaksioner dan kontra-revolusioner.

Peraturan² Ekonomi 26 Mei lahirnja tidak setjara kebetulan. Ketjuali ia lahir atas dorongan untuk sebanjak mungkin mendapatkan „bantuan” dolar dari Amerika Serikat, sekaligus merupakan suatu manifestasi daripada kapitalis-birokratisme jang dengan

sadar dan berentjana berusaha lebih merusak dan mengatjaukan lagi perekonomian nasional kita.

Dalam keadaan Indonesia sedang dilanda olen arusnja krisis moneter jang bergabung dengan krisis kemerosotan produksi dan matjetnja distribusi-komunikasi, maka Peraturan² 26 Mei telah lebih memperdalam krisis ekonomi itu. Dengan melondjaknja ongkos produksi disemua sektor, merosotnja dajabeli rupiah dan dajabeli Rakjat, dengan naiknja harga dan tarif, dengan semakin bertambahnja defisit anggaran belandja Negara, maka produksi akan mengalami kemerosotan lagi jang lebih hebat dan bersamaan dengan itu harga barang² kebutuhan pokok akan melondjak² lagi. „Regane sojo ndedel, tansah ora keno ditjekel”, begitulah bisikan jang sering terdengar dikalangan Rakjat.

Bukanlah suatu hal jang kebetulan, bahwa jang paling getol dan bersemangat untuk menjokong Peraturan² Ekonomi 26 Mei adalah kaum Soksi-is, kaum reaksioner dan kontra-revolusioner jang tampil dengan sembojan : „Hanja tukang tjatut jang mati kutu, karena Peraturan² Ekonomi 26 Mei”.

Rakjat Indonesia jang sudah tinggi kesadaran politiknya, telah lama menetapkan sasaran aksi²nja setjara tepat dalam perdjuaanjanja untuk merehabilisasi dan menormalkan proses perkembangan produksi dan komunikasi, jaitu menuntut agar perusahaan² negara dibersihkan dari elemen² kapitalisme birokrasi, elemen² anti-Rakjat dan anti-Manipol dan anti-persatuan nasional jang revolusioner.

Gerakan „tundjuk hidung” jaitu menundjuk setjara langsung orang² jang bertanggungjawab dalam perusahaan jang perbuatannja terang merugikan negara dan Rakjat, telah memberikan hasil² jang memuaskan.

Sekarang sudah datang saatnja untuk mengadakan kampanye jang luas berdasarkan pengalaman² Rakjat sendiri, guna menelاندjangi musuh² negara dan Rakjat jang masih bertjokol dalam badan² ekonomi dan keuangan, setjara litjin bersembunji dibelakang kedok „Manipol-Usdek” dan dibelakang konfrontasi terhadap Malaysia, tetapi jang sekarang sudah terbuka kedoknja sebagai konseptor² dan pembela² teror Peraturan² Ekonomi 26 Mei; mengadakan aksi² massa jang luas ber-sama² dengan golongan² lainnja jang demokratis dan progresif, untuk menuntut retuling aparatur dan personalia pada badan² ekonomi dan keuangan, pada badan² Pemerintahan dari pusat sampai ke-daerah². Aksi² sedemikian itu adalah adil, wadjar dan masuk-akal, dan frontnja adalah tjukup luas. Keputusan² PB FN, terutama Pantja Program dengan perintjiannja, keputusan²nja tanggal 5-6 September dan keputusan Mu-

bes Angkatan 45 baru² ini merupakan pedoman aksi jang umum dan jang akan sangat membantu melantjarkan aksi² itu.

Bersamaan dengan itu kaum buruh dan kaum tani harus mengkonsolidasi kemenangan² jang sudah tertjapai dan mengembangkannja lebih landjut.

Dewan² Perusahaan Negara dibidang perkebunan, pertanian, industri dan perdagangan harus meluaskan tugas²nja jang sekarang ini masih sangat terbatas.

Dewan² Perusahaan itu seharusnya merupakan suatu alat „social-control” jang efisien; merupakan alat bagi Rakjat pekerdja, kaum buruh dan kaum tani, untuk mengembangkan alat² produksi dan mentjapai daja-produksi setjara maksimal, untuk melawan sabotase kaum reaksioner dan kaum subversi, dan untuk dapat meng-„kiprahkan” Rakjat pekerdja sendiri. Sudah tentu ini semuanya harus dilakukan dalam suasana kompetisi Manipolis diantara semua golongan² dan orang² pendukung Manipol jang sedjati.

Berdasarkan keterangan diatas, maka harus segera dilakukan tindakan² dibidang produksi dan komunikasi sbb :

- a. 1. Adakan gerakan massa luas untuk rehabilitasi aparat produksi dan komunikasi dan berikan tanggungjawab kepada kaum buruh dan kaum tani atas pemeliharaan dan penguasaan aparat² itu. Pemerintah harus menjediakan devisa jang tjukup untuk keperluan mengimport barang² modal, bahan² baku dan penolong.
2. Lantjarkan dan perbesar kapasitas hubungan telekomunikasi. Lantjarkan dan tertibkan lalu lintas barang di-daerah² pelabuhan, chususnja di-daerah² pelabuhan utama dengan mempertjepat djalannja bongkar/muat dan memperbesar kapasitas pelabuhan. Laksanakan dengan sungguh² prinsip demokrasi dipimpin dalam mewujudkan pimpinan jang efisien dan produktif atas segala bentuk aktivitas di-pelabuhan².
- b. Adakan kompetisi Manipolis untuk memenuhi target produksi dan alat² telekomunikasi berdasarkan prinsip prioritas projek² dan rentjana² jang telah ditetapkan oleh MPRS. Lawan setiap usaha untuk meliberalisasi pelaksanaan projek² produksi dan komunikasi.
- c. Bentuk Dewan Produksi jang berkomposisi Nasakom dibawah Pimpinan Presiden Sukarno jang bertugas membikin rentjana pelaksanaan tahunan setjara diperintji dengan memberikan perhatian chusus kepada usaha memperbesar produksi pertanian, terutama beras, perkebunan terutama karet dan kopra, pertambangan terutama timah, dll.

- d. Berantas salahurus dan salahduduk dan lawan salahtundjuk, melalui kampanye berentjana untuk menelanjangi perbuatan² tjurang dan korup pentjoleng² negara, kaum kapitalis birokrat dan elemen² subversi bekas² Soska-Masjumi jang bersarang dibanjak badan² ekonomi dan keuangan. Adakan retuling dan perombakan aparat serta personalia pada badan² itu dan ganti tukang² salahurus jang salahduduk karena salahtundjuk, dengan tenaga² jang patriotik, Manipolis² sedjati dan bertjita² Sosialisme Indonesia jang ilmiah.
- e. Adakan demokratisering dalam kontrol, dengan melakukan tjara² pengurusan perusahaan jang terbuka, berikan tugas² kepada Dewan Perusahaan jang kongkrit dan efisien sehingga dapat mendjamin setjara maksimal hasil² kerdjasama dan musjawarah antara wakil² kaum buruh dan kaum tani dengan tenaga² ahli jang Manipolis sedjati.
- f. Ambilalih perusahaan² perkebunan dan perminjakan Inggris, dan mengubah apa jang dinamakan „Perdjandjian Karya” antara PN² RI dengan kongsi² minjak raksasa asing, sehingga sesuai dengan prinsip² production sharing berdasarkan kredit dengan bunga jang rendah dan saling menguntungkan sebagaimana telah dirumuskan dalam keputusan KOTOE beberapa bulan jang lalu. Kuasai sepenuhnya devisa jang dihasilkan oleh perusahaan² monopoli minjak Stanvac dan Caltex.
- g. Pemerintah supaya menetapkan target² produksi perusahaan² penggilingan padi, sesuai dengan kapasitas maksimal jang dapat ditjapai, dan mendjamin persediaan padi di-tempat² penggilingan.
- h. Badan² „Koperasi” jang bersifat kapitalis supaya dibubarkan, dan bentuk sebanyak mungkin koperasi produksi jang progresif disektor pertanian, perikanan, dan perindustrian ketjil.

VI

TOLAK „BANTUAN” DARI MANAPUN JANG MERUGIKAN INDONESIA

Mengenai apa jang dinamakan „bantuan” dari negara² jang dikuasai oleh OLDEFO, terutama AS dan Inggris, pada waktu achir² ini nampak perkembangan jang baik dalam djalalan fikiran sementara orang dan golongan jang mula², sadar atau tidak sadar, mendukung sikap kaum reaksioner jang berpendapat setjara prinsipil bahwa „bantuan” dari negara imperialis atau negara² OLDEFO itu adalah mutlak diperlukan dengan dalih, bahwa „Indo-

nesia kekurangan tenaga² ahli yang berpengalaman dan berkaliher internasional", „Indonesia kekurangan modal", „Indonesia masih sangat terbelakang", dan lain² sebagainya.

Sedjak dulu kita berpendirian, bahwa kita bisa menerima setiap bantuan darimanapun djuga asalkan tidak disertai dengan sjarat² baik politik, ekonomi maupun militer, akan tetapi sebaliknya kita menolak dan menentang keras setiap „bantuan" yang ditjekokkan kepada Indonesia dengan matjam² sjarat yang mengikat dan merugikan itu.

Pengalaman² membuktikan bahwa sikap yang kita ambil itu adalah benar dan tepat. Sebagai tjontoh yang kongkrit dan sangat menjolok adalah pengalaman kita sekitar Peraturan² Ekonomi 26 Mei yang sudah kita kenal itu.

Didepan Sidang Pleno DPR-GR tanggal 12 Desember 1963 itu, sebagaimana telah kita ketahui semua, Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio menerangkan, bahwa Peraturan² 26 Mei sudah gagal samasekali, karena terlalu didasarkan pada harapan² untuk mendapatkan ber-djuta² dolar. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa ber-djuta² dolar yang di-harap²kan itu tidak kundjung muntjul djuga?

Kaum imperialis, memang bukan imperialis kalau tidak terlalu serakah atau terlalu murka. Sebab Peraturan² 26 Mei sendiri sebetulnja sudah merupakan ujud daripada sjarat² bagi „bantuan" yang telah mereka djandjikan itu. Devaluasi, liberalisasi harga, dengan akibat inflasi yang lebih menghebat lagi, itulah sebetulnja sjarat² yang telah ditjekokkan oleh kaum imperialis dalam bentuk Peraturan² 26 Mei kepada Indonesia, untuk dapat menerima „bantuan" yang disanggupkan sebanjak tidak kurang dari AS \$ 300-400 djuta.

Akan tetapi rupa²nja sjarat itu belum tjukup. Disamping itu kaum imperialis menekankan sebagai sjarat mutlak agar Indonesia membebek sadja kepada politik reaksioner dan agresif kaum imperialis, chususnya politik neo-kolonial Inggris yang disokong oleh imperialis AS yang telah menelorkan projek „Malaysia" itu.

Hal ini, pertama bisa dibuktikan dari saran Djenderal L.C. Clay, penasehat almarhum Presiden Kennedy, beberapa saat sesudah DEKON diamanatkan oleh Presiden Sukarno, dan beberapa minggu sebelum berlakunja Peraturan² Ekonomi 26 Mei dalam suasana yang hangat dan tjukup tadjam yang meliputi rentjana agresif kaum imperialis Inggris, untuk mendirikan „Malaysia".

Pada waktu itu Djenderal Clay memberikan saran, agar Indonesia djangan diberikan „bantuan ekonomi", sebelum Indonesia mau menghentikan „petualangan² internasionalnja" (maksudnja

perlawanan Rakjat terhadap gagasan pembentukan „Malaysia", dan terhadap kaum imperialis pada umumnya).

Bukti yang kedua dapat kita lihat dari kenyataan, bahwa pada tanggal 27 Djuli yang lalu, di Paris telah diadakan pertemuan besar antara anggota DAC (Development Assistance Committee) yang terdiri semuanya dari negara² OLDEFO jaitu Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, Djerman Barat, Italia, Nederland, Portugal, Belgia dan Norwegia guna membitjarakan persiapan² pemberian „bantuan" sebanjak \$ 300-400 djuta, kepada Indonesia dengan maksud „untuk menstabilisasi ekonomi dan bidang keuangannya" (yang dimaksud ialah Peraturan² 26 Mei). Amerika sendiri menurut berita „Reuter" tanggal 27 September menjanggupkan untuk sedikit²nja memberikan „sumbangan" \$ 200 djuta. Akan tetapi berita „Reuter" itu lebih landjut mengemukakan, bahwa „rentjana memberikan" bantuan itu, untuk sementara dibekukan, sambil menunggu penindjauan kembali sikap Indonesia terhadap „Federasi Malaysia".

Djadi „bantuan" sebanjak \$ 300-400 djuta yang disanggupkan oleh kaum imperialis dan neo-kolonialis itu, disamping disertai sjarat² ekonomi yang sudah dituangkan dalam Peraturan² 26 Mei, djuga disertai sjarat² politik yang sangat prinsipil dalam hubungan dengan pembentukan „Malaysia".

Dan bagaimanakah sikap kaum reaksioner Amerika Serikat, setelah pada waktu sekarang ini perdjjuangan Rakjat Indonesia, untuk melawan dan menghantjurkan projek neo-kolonial „Malaysia" semakin memuntjak dan semakin tegas?

Ketika di Washington sedang ramai²nja dicitjarakan „bantuan" luarnegeri dalam Kongres Amerika Serikat, maka pedjabat AID (Agency for International Development) Amerika Serikat di Djakarta berusaha untuk lebih mengatjaukan lagi suasana Kongres dengan mengatakan bahwa „ada bantuan yang diberikan kepada Indonesia yang tidak senonoh", dan sementara itu harian reaksioner „New York Herald Tribune" menulis, bahwa „reaksi Indonesia terhadap Malaysia yang sangat keras tidaklah menghe-rankan sebab disatu pihak „Malaysia" bertudjuan untuk mendjadi penghalang terhadap „expansionisme Sukarno" dan difihak lain terhadap „expansionisme sahabat Sukarno, ialah Mao Tse Tung".

Bukan sadja terhadap Indonesia, akan tetapi djuga terhadap Filipina yang telah hidup dalam dominasi kaum imperialis Amerika, Amerika telah menundjukkan sikap yang reaksioner dan kepala batu dengan mengantjam hendak memberhentikan semua „bantuan" kepada Filipina, apabila negara ini tidak merubah pendiriannya terhadap „Malaysia".

Akan tetapi tidak ada sendjata reaksioner kaum imperialis yang tidak merupakan bumerang terhadap kaum imperialis sendiri. „Bantuan” mereka kepada negara² yang sedang berkembang yang digembar-gemborkan sebagai usaha² filantropis, guna „membantu negara² tersebut mengembangkan ekonomi nasionalnya dan memberikan makanan (sic) kepada ratusan djuta Rakjat yang kelaparan”, ternjata malahan telah mentjiptakan sjarat² objektif yang menelandjangi maksud² djahat mereka sendiri.

Dari Kenya, melalui Pakistan, Sri Lanka, Kambodja dll. sampai ke Argentina, golongan² yang berkuasa di-negara² yang baru berkembang sudah mulai bangkit membuka kedok „bantuan” yang diberikan oleh kaum imperialis Amerika Serikat.

Belum lama berselang Presiden Pakistan Djenderal Ajub Khan telah mengatakan bahwa „bantuan” yang diberikan oleh Barat dengan tangan kiri, diambilnya kembali dengan tangan kanannya dalam bentuk yang lebih luas lagi.

Dan baru beberapa hari yang lalu harian Kambodja „La De-peche Cambodge” menulis, bahwa „bantuan” AS adalah tipuan belaka. Dan telah kita ketahui, bahwa Pangeran Sihanouk telah menyatakan menolak „bantuan” dari AS, baik militer maupun ekonomi.

Pengalaman mengenai „bantuan” yang telah didjandjikan oleh kaum imperialis dengan sjarat² yang berbentuk Peraturan² 26 Mei adalah suatu pengalaman yang sangat pahit dan tragis, sebab sebelum „bantuan” itu bisa diterima sudah dipaksakan lebih dulu sjarat²nya yang sangat merugikan karena ternjata telah menggon-tjangkan sendi² perekonomian kita yang sudah tjukup labil ini.

Bagaimanakah sikap kita terhadap „bantuan” yang sudah dan masih akan diberikan oleh Amerika maupun yang diberikan oleh Inggris berdasarkan perdjandjian² yang telah dibuat oleh negara² tersebut dengan RI?

Adalah tepat keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah untuk menghentikan „bantuan” ekonomi dari beberapa negeri asing dalam rangka rentjana Kolombo jaitu antara lain dari Australia, karena sudah ternjata „bantuan” itu digunakan sebagai alat untuk memaksakan politik mereka dalam soal „Malaysia”.

Sekarang sudah tjukup alasan bagi Pemerintah untuk mengambil sikap terhadap „bantuan” dari Amerika Serikat, lebih² setelah setjara resmi AS dengan perantaraan dutabesarnja di Kuala Lumpur, Tuan Charles Baldwin, memberitahukan kepada apa yang dinamakan „PM Pemerintah Malaysia” si Tengku Abdul Rachman, bahwa AS tidak akan memberikan bantuan militer dan ekonomi yang baru kepada Indonesia.

Berdasarkan bukti² yang terang dan njata bahwa Amerika Serikat menggunakan soal „bantuan” sebagai alat untuk memaksakan politiknya yang reaksioner kepada Indonesia, maka sudah pada tempatnya dan djuga tepat pada saatnya apabila Pemerintah mem-batalkan semua rentjana „bantuan” dari AS yang sudah ditetapkan dalam persetudjuan² dan belum direalisasi jaitu misalnja perse-tudjuan dengan ACA (Agricultural Commodities Agreement) untuk tahun 1962-1964 sebanjak AS \$ 127,2 djuta, dan bersamaan dengan itu menjatakan setjara resmi untuk menolak semua „bantuan” yang baru dari AS.

Sebagaimana telah diterangkan oleh Presiden Sukarno dalam GESURI, maka Indonesia tidak akan mengemis-ngemis bantuan dari luarnegeri dan akan menolak setiap „bantuan” yang ditjekokkan dengan sjarat².

„Bantuan” dari negara² yang dikuasai oleh OLDEFO yang di-kepalai oleh imperialis Amerika Serikat ketjuali selalu disertai dengan sjarat² politik seperti telah dikatakan lebih dulu, djuga selalu disertai dengan sjarat² ekonomi sehingga dengan „bantuan” yang sudah sangat banjak dari Amerika itu, Indonesia masih tetap merupakan negeri yang ekonominya sangat tergantung kepada negeri asing, karena dari „bantuan” sebanjak AS \$ 630 djuta tidak ada samasekali yang berupa mesin² yang diperlukan untuk industri berat, dan hampir 50% dari semua pindjaman itu, jaitu pindjaman dari ACA sebanjak AS \$ 314 djuta terdiri se-mata² dari bahan² hasil pertanian seperti beras, tepung terigu, kapas, tembakau dan bahan² inipun harus diangkut oleh alat² pengangkutan laut dari Amerika yang ongkosnya ditanggung oleh Indonesia.

Dan kaum imperialis sendiri, terutama Amerika Serikat tidak pernah menyembunikan maksud²nya yang djahat daripada „bantuan” yang mereka berikan kepada negara² yang baru berkembang. Baru² ini Menteri Luarnegeri AS Dean Rusk menyatakan dengan teras terang bahwa „bantuan” AS adalah alat politik yang paling ampuh untuk melaksanakan politik luarnegeri dengan hasil² yang memuaskan.

Dan terhadap utjapan Dean Rusk ini Rakjat Indonesia hanya mengenal satu djawaban dalam bahasa yang sederhana: adalah hak tuan untuk berbitjara begitu, akan tetapi adalah hak Rakjat Indonesia pula untuk menolak setiap „bantuan” dari negeri tuan, karena „bantuan” itu ternjata hanya membawa akibat malapetaka dan kemiskinan yang lebih merata bagi Rakjat Indonesia.

VII

TERUSKAN PEMBANGUNAN BERENTJANA JANG DEMOKRATIS DAN PATRIOTIK

Meneruskan pembangunan tidaklah bisa berarti lain, melainkan meneruskan pembangunan berentjana berdasarkan garis² jang telah ditetapkan oleh MPRS. Dan suatu pembangunan berentjana hakekatnja adalah usaha untuk mengembangkan setjara berentjana tenaga² produktif, jaitu alat² produksi dengan tenaga² manusia, Rakjat pekerdja, jang melalui alat² produksi itu mengubah bahan² baku, bahan² penolong dan barang² modal mendjadi kekajaan materiil jang berguna bagi penyelesaian Revolusi Agustus 1945.

Adalah tepat apa jang dinjatakan dalam Dekon „kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan, sebagai sjarat untuk menimbulkan dan menjalurkankan daja-kerdja, dajakreatif Rakjat setjara maksimal”.

Dan dalam Gesuri oleh Presiden Sukarno dinjatakan, bahwa „mengutamakan kenaikan produksi adalah keharusan, karenanja setjara positif harus mengembangkan tenaga produktif daripada buruh dan tani”.

Djadi djelaslah mengapa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, atau dengan perkataan lain mengapa kita harus menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai basis pembangunan berentjana. **Pertama**, jalah karena sebagian terbesar daripada Rakjat pekerdja kita, tenaga produktif jaitu ber-puluh² djuta kaum tani dan buruhtani melakukan aktivitet produktifnja dibidang pertanian. Djadi dibidang pertanian inilah terdapat sumber tenaga manusia jang sangat luas, tenaga² produktif jang bisa mengubah tanah, sebagai kekajaan alam, mendjadi sumber nilai² materiil jang baru jaitu bahan² makanan, terutama beras, djagung, kedele, dan lain² sebagainya.

Kedua, perkebunan menghasilkan bahan² export jang sangat penting bagi negara, karena menghasilkan devisa negara jang sangat dibutuhkan untuk mendatangkan bahan² baku, dan penolong dan barang² modal, barang² jang mutlak harus diimport untuk sementara, dari luarnegeri.

Ketiga, pembangunan berentjana jang berdiri diatas prinsip pertanian dan perkebunan sebagai basis, bukan sadja bisa mendjaminkan sumber pembeajaan pembangunan, akan tetapi sekaligus djuga merupakan sjarat mutlak untuk industrialisasi dalam djangka panjang, dengan industri berat sebagai intinja. Melakukan industrialisasi, dengan pembangunan industri berat sebagai intinja, tanpa

bersandar kepada pertanian dan perkebunan sebagai basis, adalah omongkosong; zaman industrialisasi a la Barat, zamannja kaum tani hanja se-mata² didjadi kudetunggan oleh kaum burdjuis liberal, sudah lewat, dan setiap usaha untuk mengembalikan zaman itu di Indonesia pasti akan mengalami kegagalan. Industri jang dibangun dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis akan merupakan tulang punggung perekonomian nasional kita, dan industri jang sedemikian itu, akan meliputi djuga pertambangan sebagai sumber jang langsung daripada bahan² untuk industri berat. Untuk sementara hasil pertambangan kita, seperti timah misalnja masih merupakan bahan export jang menghasilkan devisa negara.

Apakah artinja mengembangkan tenaga produktif dibidang pertanian? Dekon telah memberikan djawaban atas persoalan ini. Jaitu membebaskan kaum tani, tanimiskin dan buruhtani dari hubungan feodal, atau dengan istilah Dekon mengikis habis sisa² feodalisme dibidang pertanian. Dan tindakan² dalam djangka pendek untuk membebaskan kaum tani dari hubungan² feodal adalah tidak lain tindakan pelaksanaan dengan konsekwen UUPA dan UUPBH dengan mengutamakan kepetingan kaum tani, seperti jang telah diuraikan dengan tandas dalam Laporan Politik Kawan Ketua. Ini adalah langkah pertama untuk melaksanakan landreform setjara radikal, sesuai dengan Program Umum Partai.

Ada sementara orang jang berpendapat bahwa andaikata landreform dilaksanakan dengan sungguh² berdasarkan UUPA, dan andaikata UUPBH djuga dilaksanakan dengan baik, maka produksi beras toh tidak akan naik, karena hal ini tidak membawa akibat perubahan luasnja tanah tanaman sebagai keseluruhan. Pendapat ini adalah tidak benar dan hakekatnja mewakili kepentingan tuantanah.

Kaum tani penggarap tanah jang dirasakan sebagai miliknya sendiri, sudah tentu dalam sjarat² lainnja jang menguntungkan, seperti teknik pengairan dan teknik penanaman jang dipimpin setjara baik, penggunaan pupuk setjara tepat, bibit unggul dan kredit jang murah dari Pemerintah, akan mengerdjakan tanahnja dengan kegairahan dan semangat jang tinggi, dan ini sudah tentu akan membawa akibat prestasi² jang lebih tinggi pula. Demikian djuga pelaksanaan UUPBH dengan baik akan mendorong kaum tani bekerdja lebih keras dan lebih giat lagi untuk memperbanyak produksi bahan² pertanian.

Menurut Dekon bukan sadja sisa² feodalisme akan tetapi djuga sisa² imperialisme harus dikikis habis. Dalam djangka pendek hal ini berarti tindakan untuk menggerowoti sisa² kekuasaan imperial-

isme di Indonesia terutama imperialisme Inggris dan Amerika Serikat. Djika imperialis Inggris tetap ngotot pada pendiriannya untuk mempertahankan projek neo-kolonialnya „Malaysia” maka harus segera diambil tindakan² untuk ambilalih modal besar Inggris dibidang perkebunan dan perminjakan. Demikian djuga sikap kita terhadap imperialis Amerika Serikat harus tegas. Sebagaimana telah dinjatakan dalam Laporan Politik Kawan Ketua, maka apa jang dinamakan „Perdjandjian Karya” harus segera dirobah sehingga sesuai dengan prinsip² production sharing jang dirumuskan dalam keputusan KOTOE beberapa bulan jang lalu. Sebab dengan perdjandjian itu berarti mendjamin berlangsungnya neo-kolonialisme dibidang perminjakan selama 30 tahun.

Tindakan² tegas untuk menggerowoti setjara kongkrit dan konsekwen sisa² imperialisme dan bersamaan dengan itu memberi hak² serta kebebasan² demokratis bagi kaum buruh disemua perusahaan, baik perusahaan negara, perusahaan swasta nasional dan domestik jang progresif, perusahaan tjampuran dan lain² berarti suatu langkah jang madju kearah pengembangan tenaga produktif kaum buruh.

Akan tetapi projek pengembangan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani sebagai sokoguru Revolusi, hanja bisa berhasil baik, apabila kaum buruh dan kaum tani dapat merasakan pimpinan kekuasaan politik, jaitu Kabinet RI, sebagai Kabinetnja Rakjat, dimana wakil² daripada Partai kelas buruh ambil bagian setjara aktif dan riil didalamnya. Kabinet ini adalah tidak lain daripada Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom dibawah pimpinan Presiden Sukarno, jang sekarang sudah menjjadi tuntutan luas dari semua golongan Rakjat jang demokratis dan progresif. Prinsip² pembentukan Kabinet Gotongrojong ini sudah dirumuskan dalam Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957 jang telah disjahkan oleh MPRS sebagai bentuk daripada Demokrasi Terpimpin, telah dirumuskan dalam Dekon dan diperintji lebih lanjut oleh PB FN dan telah diterima dan disetudjui djuga pada pokoknja oleh Mubes Angkatan 45 beberapa hari jang lalu, sebagai salah-satu tuntutan Angkatan 45.

Djelasnja, untuk memperbesar produksi harus dikembangkan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani, dan untuk mengembangkan tenaga² produktif ini harus segera diambil langkah² melaksanakan landreform dengan konsekwen, mendjamin hak² serta kebebasan² demokratis kaum buruh dan kaum tani dan menggerowoti sisa² imperialisme, menudju kepembentukan susunan ekonomi jang patriotik, jaitu ekonomi terpimpin atau ekonomi gotongrojong jang anti-imperialis, anti-neo-kolonial dan anti-feodal,

dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis, dan industri sebagai tulangpunggung dibawah pimpinan Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Pengalaman Rakjat sendiri makin memperkuat kejakinan bahwa untuk dapat mewujudkan ekonomi terpimpin atau ekonomi gotongrojong itu harus berlaku kekuasaan politik serta aparat ekonomi jang sesuai, jaitu Kabinet Gotongrojong jang berporoskan Nasakom dan retuling aparatur ekonomi disemua tingkatan dan sektor. Konsepsi ekonomi jang baik hanja bisa dilaksanakan oleh aparatur jang baik, bukan oleh kaum Manipolis dan kaum Dekonis munafik.

Perwujudan susunan ekonomi gotongrojong akan melalui suatu proses jang panjang dan ini hanja akan bisa berhasil apabila diambil tindakan² djangka pendek, termasuk tindakan² urgen, jang harus diambil sekarang djuga jang pada pokoknja sudah kita rumuskan dimuka jaitu mengganjang kesulitan² ekonomi, mengachiri penjelewengan Peraturan² 26 Mei dan memenangkan konfrontasi ekonomi terhadap Malaysia.